

## **SKRIPSI**

# **ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Diajukan Untuk Melengkapi Serta Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S1) Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu  
Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Oleh :

**MARDIYULIS**  
**NIM. 10875004182**

**PROGRAM S.1  
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU**

**2012**

# **ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**Abstrak**

**Oleh  
MARDIYULIS**

*Penelitian ini berjudul Analisis Pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kuantan Singingi, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi, dengan indikator Sistem dan Prosedur Pemungutan yang terdiri dari Proses Pendaftaran dan Pendataan, Proses Pemungutan (Penagihan), dan Pembukuan dan Pelaporan, serta Kualitas Kerja (Sumber Daya Manusia) dan Partisipasi Wajib Pajak dengan data yang diambil data primer dan data sekunder. Analisis yang digunakan analisis deskriptif yaitu data yang terkumpul dianalisis dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian menginterpretasikan terhadap hasil yang relevan dan diambil kesimpulan dan saran. Dari analisis data diperoleh hasil sebagai berikut : Proses pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan pada dinas Energi dan Sumber daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi yang meliputi ; Pendaftaran dan Pendataan, Pembukuan dan Pelaporan dan Pemungutan (penagihan) diperoleh hasil Kurang baik dengan presentase 40,33%, Kualitas Kerja (sumber daya manusia) yang bekerja pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral diperoleh hasil Kurang baik dengan presentase 38%, dan Partisipasi Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan diperoleh hasil kurang baik dengan presentase 45%. Kesimpulan dari pelaksanaan pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kuantan Singingi belum terlaksana dengan baik.*

**Kata kunci: Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Sistem Pemungutan Pajak, dan Pendapatan Asli Daerah.**

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Tiada kata yang paling pantas penulis ucapkan kecuali Alhamdulillah Wasyukurillah karena dengan limpahan Rahmat dan Hidayah serta petunjuk dari-Nya, maka penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”**. Kemudian shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan Keluarga, Para Sahabat dan Para pengikut-Nya.

Selanjutnya tidak lupa penulis sampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya atas bimbingan, bantuan dan pengarahan serta dorongan yang diberikan oleh berbagai pihak terutama :

1. Ibunda **Siti Rosnah** dan Ayahanda **Ali Limis** serta Ayah Angkat **Ahmad Sidik** yang telah membesarkan, mendidik dan menyekolahkan anaknda dan yang telah banyak memberikan Do'a dan semangat yang tak habisnya, sehingga Anaknda mampu menyelesaikan tugas akhir ini, Juga kepada Kakandaku **Dewi** serta abang Ipar **Setiadi Yendra** yang telah banyak memberikan semangat untuk terus berjuang demi mencapai cita-cita yang diharapkan. Tak terlupakan buat Adinda **Roly Yanita** dan Adik Ipar, serta kepada Seluruh keluarga tercinta.

2. Rektor UIN SUSKA Riau, **Prof. DR. H.M. Nazir Karim, M.A.** Serta Seluruh Pejabat Rektorat UIN SUSKA RIAU.
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, **Dr. Mahendra Romus, M.Ec.** Serta Pejabat Dekanat.
4. Bapak **Drs. Al Masri M.Si.** dan **Rusdi S.Sos. MA** Selaku ketua Jurusan & Sekretaris Jurusan Administrasi Negara UIN Suska Riau
5. Bapak **Trian Zulhadi, SE. M.Ec** selaku Pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau yang telah banyak membantu serta memberikan ilmu kepada penulis.
7. Bapak **Afrinaldi, S.IP. M.Si** selaku Penasehat Akademik yang senantiasa memotivasi dan memberikan pengajaran kepada penulis.
8. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan Pegawainya yang telah memberikan data dan perlengkapan lainnya sampai diakhir skripsi ini jadi.
9. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral beserta Pegawai yang telah memberikan kemudahan dalam pengambilan data.
10. Buat paman **Ahmad Abdullah, Sailias** dan **Dolisman** yang senantiasa memberikan dukungan.
11. *Tak terlupakan terima kasihku buat Calon Pendamping hidupku yang begitu sabar menghadapi tingkahku dan banyak memberikan motivasi untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.*

12. Para sahabatku Nanda Sonefil, Setiawan, M. Ajis, Nurul Ikhsan, Sudarmono, Yulindra, Elfitra dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

13. Teman-Teman Seperjuangan angkatan 2008 Jurusan Administrasi Negara,  
(Your Best Friends)

Terlebihnya penulis menyadari Skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan adanya keterbatasan ilmu dan kemampuan dalam penulisan, namun penulis telah mengupayakan yang terbaik, maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun agar kiranya di masa mendatang akan lebih baik hendaknya. Amin

Akhirnya dengan segala masukan dari semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini penulis ucapkan terima kasih. Penulis berharap semoga nama-nama yang tersebut di atas yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil diberikan anugrah pahala dari Allah SWT, penulis juga berharap hasil skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Pekanbaru, 12 Januari 2012

Penulis

**MARDIYULIS**  
**NIM. 10875004182**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan manfaat Penelitian .....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II TELAAH PUSTAKA</b>	
2.1 Keuangan Daerah.....	8
2.2 Pengertian Pajak .....	9
2.3 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan.....	15
2.4 Tinjauan Pajak Dalam Islam.....	19
2.5 Pengertian Pemungutan .....	19
2.6 Asas-asas Pemungutan Pajak.....	20
2.7 Syarat Pemungutan Pajak .....	23
2.8 Cara Pemungutan Pajak.....	24

2.9 Sistem Pemungutan Pajak.....	26
2.10 Pendapatan Asli Daerah.....	47
2.11 Definisi Konsep .....	29
2.12 Hipotesis .....	30
2.13 Variabel Penelitian.....	30

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

3.1 Waktu dan tempat Penelitian.....	31
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	31
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	31
3.4 Populasi dan Sampel.....	32
3.5 Analisis Data.....	33

### **BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

4.1 Tinjauan Umum Kabupaten Kuantan Singingi .....	34
4.1.1 Geografis .....	36
4.1.2 Topografi .....	37
4.1.3 Geologi .....	37
4.1.4 Iklim .....	37
4.1.5 Hidrografi .....	38
4.1.6 Penduduk dan Perkembangannya.....	38
4.2 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.....	40
4.2.1 Struktur Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi .....	41

4.2.2 Tugas Pokok Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten	
Kuantan Singingi.....	42
4.2.3 Gambaran Personil (Pegawai) Dinas Pendapatan Daerah .....	48
4.2.4 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah .....	49
4.2.5 Tujuan dan Sasaran Dinas Pendapatan Daerah .....	49
4.3 Sejarah Singkat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten	
Kuantan Singingi .....	51
4.3.1 Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya	
Mineral .....	53
4.3.2 Struktur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.....	54
4.3.3 Tugas dan Wewenang Pegawai Dinas Energi dan Sumber	
Daya Mineral.....	55
4.3.4 Gambaran Pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya	
Mineral .....	56

## **BAB V HASIL PENELITIAN**

5.1 Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan	
Batuan .....	59
5.1.1 Sistem Pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan	
Batuan .....	51
5.1.2. Prosedur Pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan	
Batuan .....	61
5.1.2.1 Proses Pendaftaran dan Pendataan .....	61
5.1.2.2 Pembukuan dan Pelaporan .....	67



5.1.2.3 Pemungutan (penagihan).....	73
5.1.3 Kualitas Kerja (sumber daya manusia).....	79
5.1.4 Partisipasi Wajib Pajak .....	85
5.2 Hambatan dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral bukan	
Logam dan Batuan.....	93

## **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

6.1 Kesimpulan.....	95
6.2 Saran .....	96

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Target dan realisasi penerimaan Pajak mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kuantan Singingi .....	4
Tabel 3.1 Keadaan Populasi dan Sampel .....	33
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk masing-masing kecamatan .....	39
Tabel 4.3 Jumlah Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi di lihat dari jenis golongan.....	48
Tabel 4.4 Jumlah Pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi di lihat dari jenis golongan .....	57
Tabel 4.5 Data tingkat Pendidikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.....	58
Tabel 5.1 Tanggapan responden tentang pelaksanaan Pendaftaran dan Pendataan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan .....	62
Tabel 5.2 Tanggapan responden tentang upaya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam pengumpulan dan penyusunan data subjek pajak .....	63
Tabel 5.3 Tanggapan responden tentang yang tidak mendaftarkan usahanya pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral .....	64
Tabel 5.4 Tanggapan responden pencatatan data Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan .....	65
Tabel 5.5 Tanggapan responden tentang Prosedur Pendaftaran dan Pendataan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan .....	66
Tabel 5.6 Tanggapan responden tentang Pembukuan dan Pelaporan pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan.....	68
Tabel 5.7 Tanggapan responden pembukuan dan pelaporan yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral .....	69

Tabel 5.8 Tanggapan responden tentang Pembukuan dan Pelaporan berdasarkan keadaan dilapangan .....	70
Tabel 5.9 Tanggapan responden tentang tindakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap wajib pajak yang tidak melakukan pembukuan dan pelaporan .....	71
Tabel 5.10 Tanggapan responden pelaporan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan .....	72
Tabel 5.11 Tanggapan responden tentang pemungutan pajak yang dilakukan oleh Kolektor .....	73
Tabel .5.12 Tanggapan responden tentang prosedur dalam Pemungutan Pajak yang diikuti oleh Wajib Pajak .....	74
Tabel 5.13 Tanggapan responden tentang Realisasi Sistem dan Prosedur dalam Pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan .....	75
Tabel 5.14 Tanggapan responden tentang hambatan Kolektor dalam pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan.....	76
Tabel 5.15 Tanggapan responden tentang peraturan yang ditetapkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam hal Pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan .....	77
Tabel 5.16 Rekapitulasi Penilaian Responden tentang Prosedur Pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan .....	78
Tabel 5.17 Tanggapan responden tentang Kualitas Kerja Pegawai dalam Pemberian Pelayanan terhadap Wajib Pajak .....	81
Tabel 5.18 Tanggapan responden tentang Pendidikan dan Skil Pegawai Pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan .....	81
Tabel 5.19 Tanggapan responden tentang Perekrutan Petugas Pemungut.....	82
Tabel 5.20 Tanggapan responden tentang Pegawai Menguasai Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan..	83

Tabel 5.21 Tanggapan responden tentang Kinerja Pegawai Pemungut Pajak dalam melaksanakan pemungutan .....	84
Tabel 5.22 hasil Rekapitulasi Penilaian Responden tentang Kualitas Kerja (sumber daya manusia) .....	85
Tabel 5.23 Tanggapan responden tentang Partisipasi Wajib Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan .....	86
Tabel 5.24 Tanggapan responden tentang Pembayaran Pajak Tepat Waktu oleh Wajib Pajak .....	87
Tabel 5.25 Tanggapan responden tentang Pembayaran sesuai Tarif yang telah ditentukan oleh Wajib Pajak.....	88
Tabel 5.26 Tanggapan responden tentang Pembayaran Pajak dengan Sistem <i>Self Assessment</i> oleh Wajib Pajak .....	88
Tabel 5.27 Tanggapan responden tentang Penunggakan Pembayaran oleh Wajib Pajak .....	89
Tabel 5.28 Rekapitulasi Penilaian Responden tentang Partispasi Wajib Pajak ..	90

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia terdiri dari beberapa provinsi dan kabupaten/kota, untuk dapat meningkatkan pembangunan suatu daerah, pemerintah kabupaten/kota tidak bisa mengandalkan sepenuhnya kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Karena kabupaten/kota memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur daerahnya sendiri. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan suatu daerah bisa terlaksana dengan baik.

Di Negara Republik Indonesia, kewenangan pemerintah daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat yaitu mengurus rumah tangganya sendiri dengan memberikan kebebasan melakukan pemungutan pajak daerah sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk menyelenggarakan pemerintahan. Berdasarkan undang-undang dasar 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai suatu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam penjelasan pasal 18 ayat (2) ditegaskan bahwa penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala sesuatu yang ada hubungannya dengan rakyat maka harus meminta persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu pemungutan pajak daerah didasarkan kepada Undang-undang.

Sesuai Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang pokok pemerintahan di daerah, pajak merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial agar daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengurus rumah tangganya sendiri. Disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah berupa

subsidi atau bantuan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumber pendapatan tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan undang-undang ini menetapkan ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2000 yang menetapkan Undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pengertian pajak daerah yang selanjutnya disebut dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah.

Sedangkan menurut R. Soemitro (2004: 1) pajak ialah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dan sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal balik langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai keperluan umum.

Dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah disebutkan sumber-sumber pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

1. Sumber pendapatan daerah terdiri dari :
  - a. Pajak daerah
  - b. Retribusi daerah
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan

d. Lain-lain PAD yang sah

2. Dana perimbangan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak daerah menempati tempat pertama dari pendapatan asli daerah dalam usaha meingkatkan pendapatan daerah memenuhi kebutuhan-kebutuhan rutin daerah dan membiayai pengeluaran-pengeluaran dari kebutuhan pembayaran di daerah itu.

Untuk mencukupi pendapatan daerahnya maka pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi melalui Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berupaya memperluas dan menambah jumlah sumber keuangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi, salah satu bentuknya adalah dengan cara pemungutan berbagai bentuk pajak dan retribusi daerah. Dalam UU No. 28 Tahun 2009 menyebutkan ada beberapa pajak yang telah ditentukan dari pemerintah pusat untuk dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah, diantaranya :

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
7. Pajak parkir
8. Pajak air tanah
9. Pajak sarang burung walet

10. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan;

11. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Sebagaimana diungkapkan sebelumnya pajak daerah merupakan salah satu penerimaan daerah yang cukup potensial. Dilihat dari jenis pajak yang dimiliki suatu daerah cukup banyak, sehingga tentu akan memberi daya dorong dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur suatu daerah. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi berupaya melakukan peningkatan dalam pengelolaan pajak daerah dan mengoptimalkan penerimaan dengan memberikan sanksi administratif dan denda bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak dari berbagai sektor pajak, termasuk Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan agar setiap tahun mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari target dan realisasi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di bawah ini.

**Tabel 1.1: Target dan Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Melalui Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.**

<b>No</b>	<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Target Penerimaan</b>	<b>Realisasi Penerimaan</b>	<b>Persentase</b>
<b>1</b>	<b>2006</b>	<b>325.000.000,00</b>	<b>221.208.382,00</b>	<b>68,06</b>
<b>2</b>	<b>2007</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>193.998.148.00</b>	<b>55,43</b>
<b>3</b>	<b>2008</b>	<b>285.000.000,00</b>	<b>158.898.387.00</b>	<b>55.75</b>
<b>4</b>	<b>2009</b>	<b>280.000.000,00</b>	<b>146.092.314,20</b>	<b>52,18</b>
<b>5</b>	<b>2010</b>	<b>280.000.000,00</b>	<b>88.704.058.48</b>	<b>31,68</b>

*Sumber : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi 2011*

Berdasarkan dari tabel 1.1 dari target yang diharapkan dan sesuai dengan subjek Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan yang ada di Kabupaten Kuantan



Singingi dapat kiranya menambah pendapatan asli daerah. Namun pada kenyataannya, dilihat dari realisasi penerimaan pajak daerah sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi melalui Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral selaku pelaksana pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan tidak dapat memenuhi target setiap tahunnya selama 5 (lima) tahun dimulai dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, karena ketidakberhasilan target itu disebabkan oleh : (1) lemahnya sumber daya manusia, (2) kurangnya kesadaran subjek Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan untuk membayar pajak, (3) prosedur pemungutan tidak berjalan dengan baik. Berdasarkan uraian diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari penjelasan di atas maka penulis mencoba merumuskan masalah pokok dalam penelitian ini sebagai berikut : ***“Bagaimanakah Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi?”***

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui sistem dan prosedur pemungutan pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Untuk mengetahui mengapa pemungutan pajak daerah sektor Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan tidak optimal.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada Dinas Pendapatan Daerah maupun Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam rangka melakukan pemungutan pajak untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah di masa yang akan datang.
- b. Sebagai bahan perbandingan dan informasi mungkin akan bermanfaat bagi kepentingan penelitian yang sama pada masa yang akan datang.
- c. Menambah ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri dalam bidang pajak daerah.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : TELAAH PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang pengertian Keuangan Daerah, Pengertian Pajak, Pengertian Pajak Mineral bukan Logam dan

Batuan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pemungutan Pajak Daerah.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas mengenai lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, dan analisis data.

### **BAB IV : GAMBARAN UMUM**

Dalam bab ini dijelaskan tentang gambaran umum tempat penelitian, yang meliputi keadaan geografis Kabupaten Kuantan Singingi, sejarah singkat tentang Kantor Dinas Pendapatan, dan sejarah singkat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

### **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini mengenai tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

### **BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **2.1 Keuangan Daerah**

Sebagaimana menurut konsep daerah otonom adalah merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka pada setiap daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan rumah tangganya. Salah satu diantaranya dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.

Menurut **C.S.T. Kansil** (2006 : 786) keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Sesuai dengan undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah bersumber dari anggaran pendapatan belanja Negara. Pendapatan asli daerah yang antara lain berupa pajak dan retribusi daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, serta kesejahteraan masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa kemampuan keuangan daerah ditentukan oleh adanya sumber pendapatan daerah yaitu pajak dan retribusi daerah dan

pendapatan asli daerah yang sah. Setiap daerah harus mampu menggali potensi pendapatan daerah untuk dapat menjalankan roda pemerintahannya.

## 2.2 Pengertian Pajak

Secara umum pengertian pajak menurut **Brotodiharjo** (dalam Waluyo 2007: 2) pajak ialah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut **Soemitro** (2004: 1) pajak ialah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dan sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal balik langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai keperluan umum.

Selanjutnya pengertian pajak daerah menurut **UU No. 28 Tahun 2009** pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-undang ini merupakan ubahan dari UU No. 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Dan menurut **Sugianto** (2008 : 2) pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa mendapat imbalan

yang seimbang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Jenis-jenis pajak daerah khusus untuk daerah kota dan kabupaten menurut UU No. 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. Pajak Hotel;

Pajak hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel. Sedangkan sebagai subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel selanjutnya yang dikatakan wajib pajak hotel dengan tarif pajak maksimum sebesar 10%.

2. Pajak Restoran;

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran.

Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman dan makanan yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan catering.

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran dimuka. Sedangkan sebagai subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan restoran selanjutnya

yang dikatakan wajib pajak restoran adalah pengusaha restoran dengan tarif pajak maksimum 10%.

### 3. Pajak Hiburan;

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama atau bentuk apapun, yang ditonton atau yang dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas berolah raga.

Objek pajak hiburan adalah penyelenggara hiburan. Sedangkan sebagai subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan menikmati hiburan. Selanjutnya yang dikatakan dengan wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Tarif pajak maksimum 35%.

### 4. Pajak Reklame;

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan dan memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan pemerintah.

Sebagai objek pajak reklame adalah semua penyelenggara reklame. Sebagai subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame. Sedangkan wajib pajak reklame

adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame, tarif pajak maksimum 25%.

5. Pajak Penerangan Jalan;

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Sedangkan sebagai subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Kemudian dikatakan wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan hukum yang menjadi pelanggan listrik atau pengguna tenaga listrik. Tarif maksimum adalah 10%.

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan;

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi yang dimanfaatkan.

Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, sedangkan subjek pajak bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Wajib pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan



batuan. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25%.

#### 7. Pajak Parkir;

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30%.

#### 8. Pajak Air Tanah;

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Objek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, sebagai subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Wajib pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 10%.

#### 9. Pajak Sarang Burung Walet;

Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Objek pajak sarang burung walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Subjek pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengisahkan sarang burung walet. Wajib pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.

#### 10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Tarif pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%.

#### 11. Bea Perolehan atas Tanah dan/atau Bangunan;

Bea Perolehan Atas tanah adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Objek pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Subjek pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang

memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Wajib pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5%.

Dalam UU No. 28 Tahun 2009 dalam pasal 3 ayat 3 mengatakan bahwa “dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah”.

### **2.3 Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan**

Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan Mineral bukan Logam dan Batuan baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi yang dimanfaatkan sesuai peraturan perundang-undangan. Pajak ini dulunya dikenal dengan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C UU No. 34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 07 Tahun 2001. Pada Tahun 2011 Pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi mengeluarkan Perda terbaru yaitu Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2011 yang nama pajaknya adalah Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, dasar hukum perubahan Perda ini adalah UU No. 28 Tahun 2009.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2011 tentang objek, subjek dan wajib pajak serta dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan Pajak Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan adalah :

- a. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:

1. asbes;
2. batu tulis;
3. batu setengah permata;
4. batu kapur;
5. batu apung;
6. bentonit;
7. batu permata;
8. dolomit;
9. feldspar;
10. garam batu (halite);
11. grafit;
12. granit/andesit;
13. gips;
14. kalsit;
15. kaolin;
16. leusit;
17. magnesit;
18. mika;
19. marmer;
20. nitrat;
21. opsidien;
22. oker;
23. pasir dan kerikil;

24. pasir kuarsa;
25. perlit;
26. fosfat;
27. talk;
28. tanah serap (fullers earth);
29. tanah diatome;
30. tanah liat;
31. tawas (alum);
32. tras;
33. yarusif;
34. zeolit;
35. basal;
36. trakkit;
37. mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud adalah :

- 1) kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;

- 2) kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.
- b. Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dimanfaatkan untuk komersial.
- c. Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- d. Tarif Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25%.
- e. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
  - 1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
  - 2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud adalah dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
  - 3) Nilai Jual pasar sebagaimana dimaksud adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat dalam wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.
  - 4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud adalah sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.



Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pasal 1 ayat 13, pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data, objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Dalam hal pemungutan pajak, pajak yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari :

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Bea Perolehan atas Tanah dan/atau Bangunan;

Sedangkan untuk Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan sesuai Perda Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 07 tahun 2001 di pungut oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi.

## **2.6 Asas-asas Pemungutan Pajak**

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutan. Sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang diperlukan yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan



oleh **W. J. de Langen** seorang ahli pajak kebangsaan Belanda (dalam Bohari, 2006 : 42) mengemukakan tujuh asas pokok pemungutan pajak sebagai berikut :

1. *Asas Kesamaan*, dalam arti bahwa seseorang dalam keadaan yang sama hendaknya dikenakan pajak yang sama. Tidak boleh ada diskriminasi dalam pemungutan pajak.
2. *Asas Daya Pikul*, yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa setiap wajib pajak hendaknya terkena beban pajak yang sama. Ini berarti orang yang pendapatannya tinggi dikenakan pajak yang tinggi, yang pendapatannya rendah dikenakan pajak yang rendah dan pendapatannya *basic need* dibebaskan dari pajak.
3. *Asas Keuntungan Istimewa*, bahwa seseorang yang mendapat keuntungan yang istimewa hendaknya dikenakan pajak yang istimewa pula.
4. *Asas Manfaat*, mengatakan bahwa pengenaan pajak oleh pemerintah didasarkan atas alasan bahwa masyarakat menerima manfaat barang-barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah.
5. *Asas Kesejahteraan*, yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa dengan adanya tugas pemerintah yang pada satu pihak memberikan atau menyediakan barang-barang dan jasa bagi masyarakat dan pada lain pihak menarik pungutan-pungutan untuk membiayai kegiatan pemerintah tersebut, akan tetapi sebagai keseluruhan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. *Asas Keringanan Beban*, asas ini menyatakan bahwa meskipun pengenaan pungutan merupakan beban masyarakat atau perorangan dan

betapapun tingginya kesadaran berwarga Negara, akan tetapi hendaknya diusahakan bahwa beban tersebut sekecil-kecilnya.

7. *Asas Keseimbangan*, asas ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan berbagai asas tersebut yang mungkin saling bertentangan, akan tetapi hendaknya selalu diusahakan sebaik mungkin. Artinya tidak mengganggu perasaan hukum, perasaan keadilan dan kepastian hukum.

Selanjutnya Undang-undang Pajak Nasional memiliki prinsip-prinsip dalam sistem pemungutan pajak seperti yang tertuang dalam penjelasan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain :

- Pertama : bahwa pemungutan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Nasional merupakan perwujudan dan pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung melaksanakan kewajiban perpajakan yang sangat diperlulukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan.
- Kedua : tanggung jawab pelaksanaan pajak berada pada anggota wajib pajak sendiri. Pemerintah hanya memberikan pembinaan, penelitian dan pelaksanaan kewajiban perpajakan tersebut.
- Ketiga : wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang berutang, sehingga dengan cara ini kejujuran dari wajib pajak sangat diperlukan dalam rangka pemungutan pajak.

Berdasarkan ketiga prinsip diatas, maka wajib pajak diwajibkan menghitung, membayar serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan, sehingga penentuan penerapan besarnya pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan oleh peraturan perpajakan.

Dengan sistem ini diharapkan pelaksanaan administrasi perpajakan yang berbelit-belit dan birokratis dapat dihilangkan. Selain itu jaminan dan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak lebih diperhatikan, dengan demikian dapat merangsang peningkatan kesadaran dan tanggung jawab perpajakan di masyarakat.

## **2.7 Syarat Pemungutan Pajak**

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

### **1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)**

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

### **2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)**

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuhan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisiensi (syarat financial)

Sesuai fungsi budgeting, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

## 2.8 Cara Pemungutan Pajak

Cara pemungutan pajak ada tiga diantaranya sebagai berikut :

1. *Stelsel Nyata (Real Stelsel)*

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2. *Stelsel Anggapan (Fictive Stelsel)*

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

### 3. *Stelsel* Campuran

Cara ini menggunakan kombinasi antara *stelsel* nyata dan *stelsel* anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

Dengan demikian maka sangat diperlukan bagi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi selaku pelaksana dalam pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan memperhatikan asas dan tata cara pemungutan Pajak Mineral bukan logam dan Batuan agar pemungutan pajak dapat berjalan dengan efektif dan efisien, begitu juga dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi selaku pelaksana penerimaan daerah melalui pajak daerah yang paling dominan dibandingkan dengan Dinas Energi dan Sumber Daya mineral Kabupaten Kuantan Singingi.

## 2.9 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2007 : 17) ada tiga macam sistem pemungutan pajak yang berlaku, yaitu :

### 1. *Official Assesment System*

*Official assessment system* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak.

Ciri-ciri *official assessment system* adalah :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya terutang berada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

### 2. *Self Assesment System*

*Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Ciri-cirinya adalah :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak daerah terutang ada pada wajib pajak (wajib pajak yang aktif).
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi (fiskus pasif).

Aparat pajak (fiskus) hanya bertugas untuk memberikan penyuluhan penerangan, pengawasan maupun sebagai verivikator.

*Self assessment system* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. *Semi self asseement system*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang pada awal tahun sebagai perhitungan sementara dan setelah periode (tahun tersebut berakhir), pajak yang sesungguhnya ditentukan oleh fiskus.
2. *Fully assessment system*, yaitu suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak yang terhutang baik pada awal tahun maupun pada akhir tahun pajak. Perhitungan pada awal tahun pajak merupakan perhitungan sementara dan pajak yang telah dibayar pada tahun berjalan nantinya diperhitungkan sebagai kredit pajak terhadap utang pajak yang sesungguhnya menurut perhitungan setelah tahun pajak berakhir. Dalam system ini fiskus tidak turut campur dalam menentukan besarnya pajak yang terutang, kecuali apabila wajib pajak atau wajib pungut menyalahi peraturan yang berlaku.
3. *With Holding System*

*With holding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Sistem dan prosedur pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas :

- a. Pendaftaran dan pendataan
- b. Penetapan

- c. Penyetoran
- d. Angsuran dan permohonan penundaan pembayaran
- e. Pembukuan dan pelaporan
- f. Keberatan dan banding
- g. Penagihan
- h. Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi
- i. Pengembalian kelebihan pembayaran.

#### **2.10 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pasal 1 No. 18) pendapatan daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu pendapatan daerah yang murni digali dari daerah itu sendiri dan dapat digunakan sepenuhnya untuk dapat dimanfaatkan sesuai dengan prioritas daerah dalam menjalankan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensinya dapat dilihat dari penerimaan asli daerah dari tahun ke tahun.



Berdasarkan undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 157 menyebutkan bahwa komponen sumber pendapatan daerah adalah terdiri dari :

1. Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari berbagai komponen, seperti :
  - a. Hasil Pajak Daerah
  - b. Hasil Retribusi Daerah
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana perimbangan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### **2.11 Definisi Konsep**

- a. Cara pemungutan pajak ada tiga diantaranya: Stelsel Nyata (*Riel Stelsel*), Stelsel Anggaran (*Fictive Stelsel*), Stelsel Campuran.
- b. Sistem pemungutan pajak daerah dengan tiga cara yaitu, dengan *Official Assesment System*, *Self Assesment System*, dan *With Holding System*.
- c. Berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2000, pasal 1 ayat 13, pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data, objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

### **2.12 Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dimana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat

pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru pada teori-teori yang relevan belum didasarkan pada fakta-fakta yang empiris dimana diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian yang jawabannya belum empirik (Sugiono 2005: 70).

Berdasarkan analisa atas literatur dan pemikiran sebelumnya, maka penulis mengambil hipotesis yaitu : ***“Dari hasil Observasi dilapangan Diduga Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kuantan Singingi tidak berjalan dengan baik disebabkan oleh Prosedur Pemungutan belum maksimal, dan Kualitas Kerja dari Sumber Daya Manusia belum optimal, serta Kurangnya Partisipasi Wajib Pajak”.***

### 2.13 Variabel Penelitian

Adapun variabel penelitian adalah :

1. Sistem dan Prosedur pemungutan, meliputi :
  - a. Pendaftaran dan pendataan
  - b. Pembukuan dan pelaporan
  - c. Pemungutan (penagihan).
2. Kualitas kerja (Sumber Daya Manusia)
3. Partisipasi wajib pajak.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian dilakukan pada kantor Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi yang bertempat di kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, penelitian diadakan pada tahun 2011.

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data skunder.

1. Data primer diperoleh dengan cara pengumpulan data langsung kelapangan melalui wawancara dengan beberapa orang responden terutama pejabat dan subjek pajak yang berwenang yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.
2. Data skunder adalah data yang dikutip dari berbagai sumber lain sehingga tidak bertindak otentik. Data tersebut biasanya berasal dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya.

#### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Dalam metode ini dipergunakan metode pengumpulan data yaitu :

1. Observasi

Yaitu pengamatan langsung pada lokasi penelitian tentang pengelolaan penerimaan pajak daerah.

## 2. Wawancara/interview

Yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dengan responden yang berhubungan dengan penelitian.

## 3. Kuisioner (Angket)

Yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan menyusun daftar pertanyaan tertulis yang dibagikan kepada responden untuk diisi sesuai dengan keperluan penelitian.

### 3.4 Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, yaitu meneliti semua elemen dalam wilayah penelitian (Arikunto, 2002:108). Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagian pegawai Dipenda, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi dan subjek Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan.

#### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. (Sugiono, 2005: 91).

Dari populasi tersebut diambil sebagian untuk ditetapkan sebagai sampel dengan menggunakan teknik purposive, yaitu teknik penentuan sampel yang mempunyai tujuan tertentu saja dengan alasan sampel mampu menguasai masalah

yang diteliti. Adapun yang menjadi Sampel pada penelitian ini adalah seperti yang tercantum pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.1 : Populasi dan Sampel Penelitian Pada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi.**

NO	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Dinas	2	2	100%
2	Sekretaris	2	2	100%
3	Kasubbag Umum	2	2	100%
4	Kasubbag Keuangan	2	2	100%
5	Kasubbag Program	2	2	100%
6	Kepala Bidang	4	4	100%
7	Kepala Sub Bidang	8	8	100%
8	Subjek Pajak	18	18	100%
	Jumlah	40	40	100%

Sumber: *Data Olahan Kantor Dinas Pendapatan Daerah dan Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi 2011.*

### 3.5 Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif. Menurut (Sugiono, 2005: 11) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Jadi penelitian ini memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan atau masalah yang bersifat aktual, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki diiringi dengan interpretasi rasional yang akurat kemudian diambil kesimpulan dan saran.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **4.1 Tinjauan Umum Kabupaten Kuantan Singingi**

Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Indragiri Hulu, namun setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 53 tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan Ibu Kotanya berkedudukan di Teluk Kuantan.

Pada saat Kabupaten Kuantan Singingi menjadi sebuah Kabupaten definitif yang terdiri dari 6 kecamatan dengan 151 pemerintahan Desa/Kelurahan, sebagai berikut :

1. Kecamatan Kuantan Tengah.
2. Kecamatan Singingi.
3. Kecamatan Kuantan Mudik.
4. Kecamatan Kuantan Hilir.
5. Kecamatan Cerenti.
6. Kecamatan Benai.

Sebagai pejabat Bupati Kabupaten Kuantan Singingi terhitung sejak tanggal 8 Oktober 1999 sampai dengan 8 Oktober 2000 adalah Drs. H. Rusdji S Abrus. Pada bulan Oktober 2000 diadakan pemilihan Bupati Kuantan Singingi yang pertama dipilih oleh anggota legislatif, sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah pasangan Drs. H. Rusdji S Abrus dengan Drs. H. Asrul Ja'afar periode

2001-2006. Ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.24.133 Tahun 2001 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.24-134, diangkat dan ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi. Selang waktu 2 bulan Bupati Kuantan Singingi terpilih meninggal dunia, jabatan Bupati digantikan langsung oleh Wakil Bupati, ditetapkan menjadi Bupati Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.24-316 tanggal, 20 Agustus 2001. Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya membawahi 6 kecamatan dimekarkan menjadi 12 kecamatan, kecamatan yang baru dimekarkan tersebut adalah :

1. Kecamatan Hulu Kuantan.
2. Kecamatan Gunung Toar.
3. Kecamatan Singingi Hilir.
4. Kecamatan Pangean.
5. Kecamatan Logas Tanah Darat.
6. Kecamatan Inuman.

Hingga sekarang pejabat Bupati Kuantan Singingi sudah mengalami beberapa kali pergantian yaitu :

1. Drs. H. Rusdji S Abrus periode tahun 2000 – 2001
2. Drs. H. Asrul Ja'afar periode 2001 – 2006
3. H. Sukarmis periode tahun 2006 – 2011
4. H. Sukarmis periode tahun 2011 - sekarang

Seiring dengan berhembusnya ”angin reformasi” memberikan perubahan yang drastis terhadap negeri ini, tidak terkecuali di Kabupaten Kuantan Singingi

sendiri. Salah satu wujudnya adalah dengan berlakunya pelaksanaan otonomi daerah yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2001.

#### **4.1.1 Geografis**

Kabupaten Kuantan Singingi secara geografis, geoekonomi dan geopolitik terletak pada jalur tengah lintas sumatera dan berada dibagian selatan Propinsi Riau, yang mempunyai peranan yang cukup strategis sebagai simpul perdagangan untuk menghubungkan daerah produksi dan pelabuhan, terutama pelabuhan kuala enok. Dengan demikian Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai peluang untuk mengembangkan sektor-sektor pertanian secara umum, perdagangan barang dan jasa, transportasi dan perbankan serta pariwisata. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan UU No. 53 tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Natuna, Karimun, Kuantan Singingi dan Kota Batam. Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 12 kecamatan dengan luas wilayah 7,656,03 km<sup>2</sup>, yang berada pada posisi antara 0<sup>0</sup>00 -1<sup>0</sup> 00 Lintang Selatan dan 101<sup>0</sup> 02 - 101<sup>0</sup> 55 Bujur Timur.

Adapun batas-batas Kabupaten Kuantan Singingi adalah:

1. Sebelah Utara dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan
2. Sebelah Selatan dengan Propinsi Jambi
3. Sebelah Barat dengan Propinsi Sumatera Barat
4. Sebelah Timur dengan Kabupaten Indragiri Hulu

Dilihat dari batas diatas kabupaten yang langsung berbatasan dengan 2 (dua) Propinsi yaitu Propinsi Jambi dan Sumatera Barat . Hal ini dapat memberikan



keuntungan bagi Kabupaten Kuantan Singingi apabila dapat memanfaatkan peluang yang ada.

#### **4.1.2 Topografi**

Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi secara morfologi dapat dibagi atas dataran rendah, perbukitan bergelombang, perbukitan tinggi dan pegunungan, dengan variasi sebagian besar merupakan satuan perbukitan bergelombang yaitu sekitar  $3^0$ - $15^0$  diatas permukaan laut.

#### **4.1.3 Geologi**

Secara Struktur Geologi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari patahan naik, patahan mendatar dan lipatan, tersusun dari kelompok batuan sedimen, metamorfosis (malihan), batuan vulkanik dan intrusi serta endapan permukaan. Disamping itu Kabupaten Kuantan Singingi memiliki potensi sumber daya mineral yang beragam.

#### **4.1.4 Iklim**

Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara  $32,6^0\text{C}$  –  $36,5^0\text{C}$  dan suhu minimum berkisar antara  $19,2^0\text{C}$  –  $22,0^0\text{C}$ . Curah hujan antara 229,00-1.133,0 mm per tahun dengan keadaan musim berkisar :

1. Musim hujan jatuh pada bulan September s/d Februari
2. Musim kemarau jatuh pada bulan Maret s/d Agustus

#### **4.1.5 Hidrografi**

Terdapat dua sungai besar yang melintasi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Sungai Kuantan/Sungai Indragiri dan Sungai Singingi. Peranan sungai tersebut sangat penting terutama sebagai sarana transportasi, sumber air bersih, budi daya perikanan dan dapat dijadikan sumberdaya buatan untuk menghasilkan suplai listrik tenaga air.

Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Kuantan mengalir 9 kecamatan yaitu Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Benai, Kecamatan Pangean, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Inuman dan Kecamatan Cerenti.

#### **4.1.6 Penduduk dan Perkembangannya**

Masalah penduduk di Kabupaten Kuantan Singingi sama halnya seperti di daerah lain di Indonesia. Untuk menciptakan manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan sulit tercapai. Program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kematian bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang harus di tingkatkan.

Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Kabupaten Kuantan Singingi sementara adalah 291.044 orang yang terdiri dari 149.368 laki-laki dan 141.676 perempuan. Data hasil SP 2010 juga menunjukkan bahwa Kecamatan Kuantan Tengah adalah kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar yaitu 52.866 orang atau sebesar

18,16% dari total seluruh penduduk Kuantan Singingi, kemudian diikuti oleh Kecamatan Singingi Hilir sebesar 35.167 orang (12,08%) dan Kecamatan Benai sebesar 32.285 orang (11,09%). Sementara itu, 3 (tiga) kecamatan dengan jumlah penduduk terendah adalah Kecamatan Hulu Kuantan sebesar 8.032 orang (2,76%), Kecamatan Gunung Toar sebesar 12.348 orang (4,24%), dan Kecamatan Cerenti sebesar 13.904 orang (4,78%).

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kuantan Singingi per tahun selama 10 tahun terakhir yakni sejak tahun 2000-2010 adalah sebesar 2,6 persen. Kecamatan Singingi Hilir adalah kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi yaitu sebesar 4,7%, disusul oleh Kecamatan Singingi dan Kuantan Tengah sebesar 3,9% dan 3,7%. Sementara itu, kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk terendah adalah Kecamatan Inuman sebesar 0,5%.

**Tabel 4. 1 : Jumlah Penduduk masing-masing Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011**

No	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	2	3	4
1	Kuantan Tengah	291,74	52.866
2	Kuantan Mudik	1.385,92	23.298
3	Kuantan Hilir	363,06	23.433
4	Cerenti	456	13.904
5	Singingi	1.953,66	20.474
6	Benai	249,36	32.285
7	Gunung Toar	165,25	12.348
8	Hulu Kuantan	384,40	8.032
9	Singingi Hilir	1.530,97	35.167
10	Pangean	145,34	16.953
11	Logas Tanah Darat	380,34	14.836
12	Inuman	450,01	12.774
<b>Jumlah</b>			291.044

*Sumber : BPS Kabupaten Kuantan Singingi 2010*

### **4.3 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi**

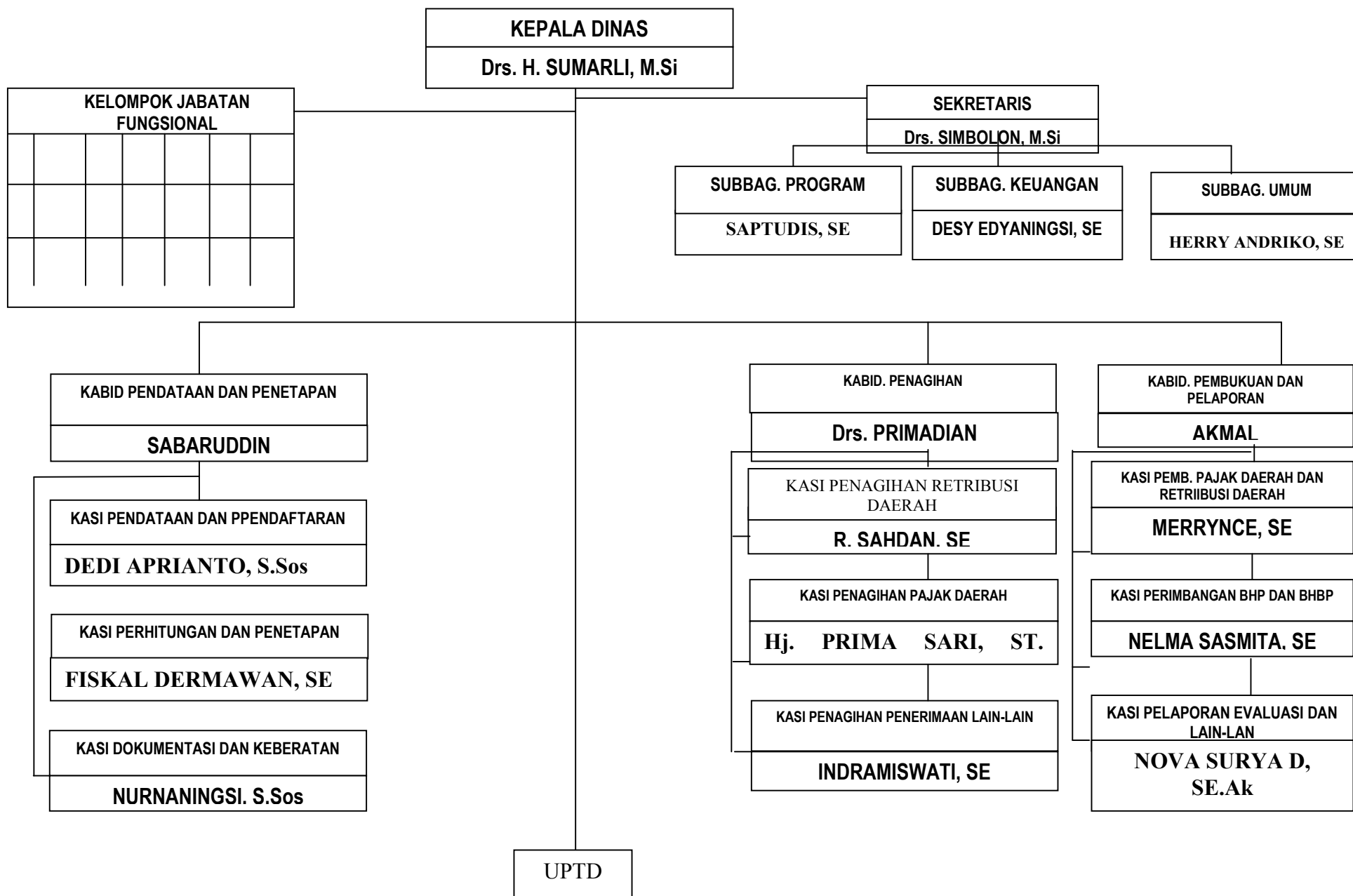
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 48 Tahun 2001 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi didasari oleh UU No. 22 Tahun 1999 serta dijabarkan lagi dengan keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor 32 Tahun 2002 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi selaku unsur pelaksana di bidang pendapatan.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai wewenang untuk menggali potensi daerah dalam rangka mewujudkan otonomi daerah. Dinas ini berperan untuk mengatur dan mengolah sumber pendapatan daerah guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pasal 4 keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor 32 Tahun 2002 disebutkan bahwa Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah di bidang pendapatan daerah dengan tugas-tugas sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan
2. Perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendapatan
3. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dan cabang dinas
4. Pembinaan teknis di bidang pendapatan
5. Pengelolaan urusan ketatausahaan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati kuantan singingi sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

#### 4.2.1 Struktur Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi



#### **4.2.2 Tugas Pokok Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi**

a. Kepala Dinas

Tugasnya antara lain sebagai berikut :

1. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan untuk meningkatkan pemasukan pendapatan daerah, pembinaan, penyuluhan.
2. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ada dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Meneliti dan mengevaluasi dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi daerah.
4. Mengkoordinir seluruh usaha pemungutan dan pendapatan daerah berdasarkan ketentuan yang digariskan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.
5. Melaksanakan penyusunan pendapatan daerah sebagai penyusunan rencana anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).
6. Mempersiapkan ketentuan pelaksanaan kebijaksanaan kepala daerah tentang pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Sekretaris Dinas/Kepala Tata Usaha

Tugasnya antara lain sebagai berikut:

1. Membantu Kepala Dinas dalam bidang ketatausahaan dan administrasi dinas pendapatan daerah.
2. Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan.
3. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi bagian serta menyusun pedoman, petunjuk tata usaha dalam pengadministrasian setiap kegiatan.
4. Membuat rencana kerja tahunan bagian tata usaha, sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
5. Membantu Kepala Dinas dalam pembinaan kepegawaian serta mengkoordinasikan masing-masing sub dinas dilingkungan dinas pendapatan daerah.
6. Memberikan saran terhadap Kepala Dinas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengadministrasian suatu kegiatan.
7. Mengumpulkan, mengolah bahan-bahan, informasi serta mengajukan pemecahan masalah dan pertimbangan Kepala Dinas untuk menjadi dasar dalam membuat suatu kebijakan.
8. Menertibkan pengarsipan serta administrasi Dinas Pendapatan Daerah dari semua kegiatan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan.
9. Mengkoordinasi setiap kegiatan baik administrasi maupun dalam kegiatan lainnya dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah.
10. Melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas.

c. Kasubbag Program

Tugasnya antara lain sebagai berikut:

1. Membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja baik rutin maupun pembangunan serta pendapatan sebagai pedoman kerja setiap tahunnya.
2. Membantu Kepala Dinas dalam menghimpun data-data dalam rangka menyusun rencana kerja tahunan.
3. Membantu Kepala Dinas dalam meneliti DURP, DUP, dan DIP Dinas Pendapatan Daerah sebelum disampaikan ke dinas/badan terkait.
4. Membantu Kepala Dinas dalam membuat laporan baik perencanaan maupun pelaksanaan serta mengevaluasi kegiatan.
5. Membantu Kepala Dinas dalam pelayanan administrasi terhadap kegiatan penyusunan rencana kerja, pelayanan anggaran, pemantauan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta pengembangan pendapatan.
6. Membantu Kepala Dinas dalam membuat pertimbangan perencanaan dan pelaksanaan yang disampaikan kepada kepala dinas untuk membuat suatu kebijaksanaan.
7. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan Kepala Dinas.

d. Kasubbag Keuangan

Tugasnya antara lain sebagai berikut:

1. Membuat/menyusun DIKDA anggaran rutin yang disetujui.



2. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan anggaran rutin.
3. Membuat permintaan gaji serta tunjangan lainnya PNS.
4. Mengusulkan ke bendaharawan rutin, gaji, bendaharawan barang, pengurus barang dan draf surat keputusan bupati tentang penunjukan BKP, pembantu BKP serta juru pungut.
5. Membuat rencana kebutuhan anggaran setiap bulan atau triwulan.
6. Menata kearsipan ruangan serta mengamankan benda-benda berharga.
7. Melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan kepala bagian tata usaha.

e. Kasubbag Umum

Tugasnya antara lain sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan urusan yang berkaitan dengan surat menyurat.
2. Membuat/mengolah inventarisasi serta menata pengarsipan.
3. Mempersiapkan seluruh kegiatan rapat/pertemuan sekaligus membuat notulennya.
4. Membuat surat perintah tugas dan SPPD.
5. Melaksanakan kebersihan ruangan lingkungan dinas serta yang berkaitan dengan keperluan untuk kelancaran tugas rumah tangga dinas pendapatan daerah.
6. Menyelenggarakan kegiatan keprotokolan dinas serta bertanggungjawab terhadap setiap kegiatan yang dilaksanakan.

7. Melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan kepala bagian tata usaha.

f. Kabid Pembukuan dan Perimbangan

Tugasnya antara lain sebagai berikut:

1. Membantu Kepala Dinas menyelenggarakan pencatatan penerimaan pajak/retribusi daerah berdasarkan SKP/SKR.
2. Membantu Kepala Dinas membuat daftar realisasi penerimaan daerah secara berkala.
3. Membantu Kepala Dinas melaksanakan pengadministrasian pembukuan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Membantu Kepala Dinas melakukan verifikasi administrasi pembukuan dilingkungan dinas pendapatan daerah.
5. Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan penataan arsip pembukuan dan verifikasi.
6. Melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas.

g. Kabid Penagihan

Tugasnya antara lain sebagai berikut :

1. Membantu Kepala Dinas dalam bidang penagihan.
2. Membantu Kepala Dinas dalam bidang penadministrasian pembukuan dan verifikasi, penagihan dan perhitungan, retribusi dan konsultasi serta penyelesaian keberatan.
3. Membantu Kepala Dinas dalam bidang penagihan pajak dan retribusi daerah yang telah melampaui batas jatuh tempo.

4. Membantu Kepala Dinas dalam melayani wajib pajak/retribusi daerah yang mengajukan banding keberatan serta memproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Membantu Kepala Dinas dalam bidang melaksanakan pencatatan seluruh penerimaan daerah yang berdasarkan SKP/SKR.
6. Membantu Kepala Dinas dalam bidang membuat daftar tunggakan serta menghitung tunggakan wajib pajak yang jatuh tempo.
7. Membantu Kepala Dinas dalam membuat daftar realisasi penerimaan secara berkala.
8. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan Kepala Dinas.

h. Kabid Pendataan dan Penetapan

Tugasnya antara lain sebagai berikut :

1. Membantu Kepala Dinas dalam bidang pendataan dan penetapan.
2. Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan pendataan dan pendaftaran, pemeriksaan data, informasi serta melakukan penetapan.
3. Membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan terhadap pendataan, pendaftaran dan penetapan terhadap wajib pajak/retribusi daerah.
4. Membantu Kepala Dinas dalam membuat laporan hasil pendataan dan pendaftaran serta penetapan untuk sebagai bahan pertimbangan kepala dinas dalam mengambil kebijaksanaan.

5. Membantu Kepala Dinas dalam menghimpun data-data yang berkaitan dengan pendataan, penetapan sebagai bahan dokumen daerah.
6. Membantu Kepala Dinas dalam membuat rencana semua jenis blanko/formulir yang diperlukan untuk kelancaran pendaftaran, pendataan dan penetapan.
7. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh kepala dinas.

#### **4.2.3. Gambaran Pegawai Dinas Pendapatan Daerah**

Selanjutnya dibawah ini dapat dilihat personsil ataupun pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dalam melaksanakan tugasnya sabagai instansi yang melakukan pembinaan dan penataan tenaga kerja di Kabupaten Kuantan Singingi, maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi memiliki pegawai berjumlah 64 orang diantaranya 52 orang PNS dan 12 orang pegawai honorer dengan golongan yang berbeda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari jenis golongannya antara lain sebagai berikut :

**Tabel 4.2 : Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dilihat dari golongan**

<b>NO</b>	<b>GOLONGAN</b>	<b>JUMLAH (Orang)</b>
1	IV/c	1
2	IV/b	3
3	IV/a	1

4	III/d	1
5	III/c	3
6	III/b	9
7	III/a	14
8	II/d	-
9	II/c	2
10	II/b	4
11	II/a	7
12	I/c	1
Jumlah		52

*Sumber data : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi 2011*

#### **4.2.3 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi**

Visi :

“Terwujudnya Optimalisasi Pendapatan Daerah Melalui Aparat yang Ramah, Profesional dan Inovatif ”

Misi :

1. Meningkatkan pendapatan daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi
2. Meningkatkan ketaatan wajib Pajak dan Retribusi
3. Meningkatkan pelaksanaan sistem dan prosedur pendapatan daerah
4. Meningkatkan produktifitas kerja pegawai.

#### **4.2.4 Tujuan dan Sasaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi**

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana yang dikemukakan, maka perlu

dijabarkan keadaan dalam bentuk yang terarah dan operasional berupa perbuatan tujuan dan sasaran. Tujuan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi antara lain :

1. Meningkatnya kegiatan Intensifikasi pendapatan daerah.
2. Meningkatnya kegiatan Ekstensifikasi pendapatan daerah.
3. Meningkatnya pelayanan prima kepada wajib pajak.
4. Meningkatnya sosialisasi produk-produk hukum tentang pajak dan retribusi daerah.
5. Meningkatnya pelaksanaan sistem dan prosedur administrasi pendapatan daerah.
6. Meningkatnya profesionalisme pegawai.

Sedangkan sasaran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya tingkat pencapaian target pendapatan daerah minimal 20% dari tahun sebelumnya.
2. Terlaksananya penggalan sumber-sumber pendapatan daerah yang baru yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Terlaksananya pelayanan dan penyampaian SKPD, SKRD dan administrasi tepat waktu.
4. Terlaksananya penyelesaian administrasi pajak dan retribusi daerah yang cepat dan tertib.
5. Terlaksananya penagihan pajak dan retribusi daerah dengan baik dan akuntabel.

6. Terlaksananya pencapaian realisasi pendapatan daerah.
7. Terpenuhinya kebutuhan fasilitas kerja yang memadai.
8. Terlaksananya hubungan kerja yang nyaman dan harmonis.
9. Terlaksananya kegiatan sosialisasi produk hukum tentang pajak dan retribusi daerah.
10. Terwujudnya kesadaran wajib pajak dan retribusi daerah dalam memenuhi kewajibannya.
11. Terlaksananya sistem dan prosedur administrasi pendapatan daerah oleh unit pengelola pajak dan retribusi daerah.
12. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan teknis bagi pegawai.

#### **4.4 Sejarah Singkat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi**

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi terletak di komplek perkantoran Pemda Kuantan Singingi di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 48 Tahun 2001 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi serta dijabarkan lagi dengan keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor 32 Tahun 2002 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi selaku unsur pelaksana di bidang Pertambangan, Energi dan Sumber daya Mineral.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai wewenang untuk menggali potensi pertambangan, energi dan sumber daya mineral daerah dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 88 keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor 32 Tahun 2002 disebutkan bahwa Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai fungsi :

1. Perumusan teknis dibidang energi dan sumber daya mineral
2. Penyelenggara urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayan umum dibidang energi dan sumber daya mineral
3. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dinas dibidang energi dan sumber daya mineral
4. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 89, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berkewenangan melaksanakan urusan pemerintahan sebagai berikut :

1. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah Kabupaten Kuantan Singingi dibidang Mineral, Batubara, Panas Bumi dan Air Tanah.
2. Penyusunan data pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi skala kabupaten.
3. Penyusunan data dan informasi cekungan air tanah skala kabupaten.
4. Pemberian rekomendasi teknis pengeboran, penggalian dan pertambangan.
5. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, batubara dan pans bumi.
6. Izin usaha pertambangan mineral dalam rangka penanaman modal.
7. Pembinaan dan pengwasan pengusaha KP.

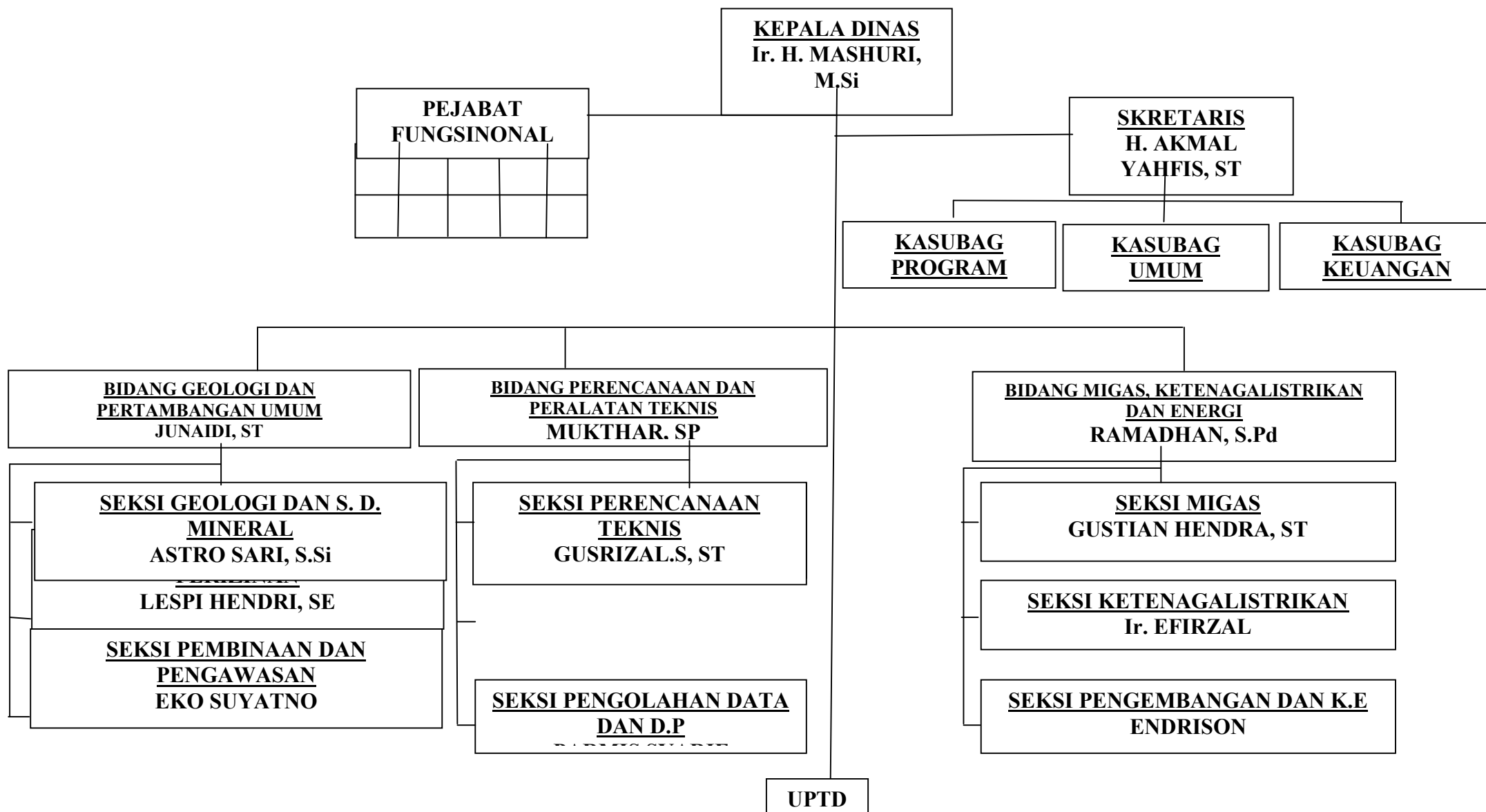


8. Penetapan wilayah konserpasi di wilayah kabupaten.
9. Melaksanakan kebijakan mitigasi di wilayah kabupaten.
10. Pemberian izin usaha penunjang tenaga listrik.
11. Penetapan peraturan kabupaten dibidang energi dan ketenagalistrikan.

#### **4.3.1 Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris mebawakan;
  - a. Sub Bagian Program
  - b. Sub Bagian Umum
  - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Geologi dan Pertambangan Umum membawakan;
  - a. Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral
  - b. Seksi Pengusahaan dan Perizinan
  - c. Seksi Pembinaan dan Pengawasan
4. Bidang Migas, Ketenagalistrikan dan Energi membawakan;
  - a. Seksi Migas
  - b. Seksi Ketenagalistrikan
  - c. Seksi Pengembangan dan Konservasi Energi
5. Bidang Perencanaan dan Peralatan teknis membawakan;
  - a. Seksi Perencanaan teknis
  - b. Seksi Operasional Peralatan
  - c. Seksi Pengolahan Data, Dokumentasi dan Promosi

#### 4.3.2 Struktur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi



### **4.3.3 Tugas dan Wewenang Pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**

#### **Kabupaten Kuantan Singingi**

a. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan pengelolaan data, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi penyusunan program dan anggaran, ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan, serta keuangan.

c. Sub bagian program

Sub bagian program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam pengolahan data, penyusunan dan pengkoordinasian rencana program dan anggaran, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

d. Sub bagian umum

Sub bagian umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam penyusunan rencana kegiatan ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, pengelolaan sarana dan prasarana, penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas serta kehumasan.

e. Sub bagian keuangan

Sub bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam pengelolaan administrasi keuangan.

f. Bidang geologi dan pertambangan umum

Kepala Bidang geologi dan pertambangan umum mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang geologi dan sumber daya mineral, perusahaan dan perizinan, pembinaan dan pengawasan.

g. Bidang migas ketenagalistrikan dan energi

Kepala Bidang migas ketenagalistrikan dan energi mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang migas ketenagalistrikan dan pengembangan dan konservasi energi.

h. Bidang perencanaan dan peralatan teknis

Kepala bidang perencanaan dan peralatan teknis mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan teknis, operasional peralatan, pengolahan data, dokumentasi dan promosi.

#### **4.3.4 Gambaran Pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**

Selanjutnya dibawah ini dapat dilihat personil ataupun pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi.

Dalam melaksanakan tugasnya sabagai instansi yang melakukan pembinaan dan penataan tenaga kerja di Kabupaten Kuantan Singingi, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi memiliki pegawai berjumlah 66 orang yang terdiri dari 42 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 24 orang pegawai honorer dengan golongan dan pendidikan yang berbeda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari jenis golongannya antara lain sebagai berikut :

**Tabel 4.3 : Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi dilihat dari Golongan**

NO	GOLONGAN	JUMLAH (Orang)
1	IV/b	1
2	IV/a	2
3	III/d	5
4	III/c	3
5	III/b	4
6	III/a	6
7	II/d	-
8	II/c	8
9	II/b	3
10	II/a	9
11	I/c	1
Jumlah		42

*Sumber data : Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Kuantan Singingi 2011*

Dan dilihat dari latar belakang pendidikan pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

**Tabel 4.5 : Data Tingkat Pendidikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi**

<b>NO</b>	<b>TINGKAT PENDIDIKAN</b>	<b>JUMLAH (orang)</b>
1	PASCA SARJANA (S2)	1
2	STRATA 1 (S1)	21
3	AHLI MADYA (D3)	9
4	SMA	35
	Jumlah	66

*Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Kuantan Singingi 2011*

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada akhir pembahasan ini akan dilakukan rekapitulasi terhadap proses pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kuantan Singingi secara keseluruhan, sehingga akan diperoleh data yang akurat terhadap pelaksanaan pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kuantan Singingi.

#### **5.1 Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan**

Pada bagian ini akan membahas mengenai sistem dan prosedur Pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di kabupaten kuantan singingi.

##### **5.1.1 Sistem Pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kuantan Singingi**

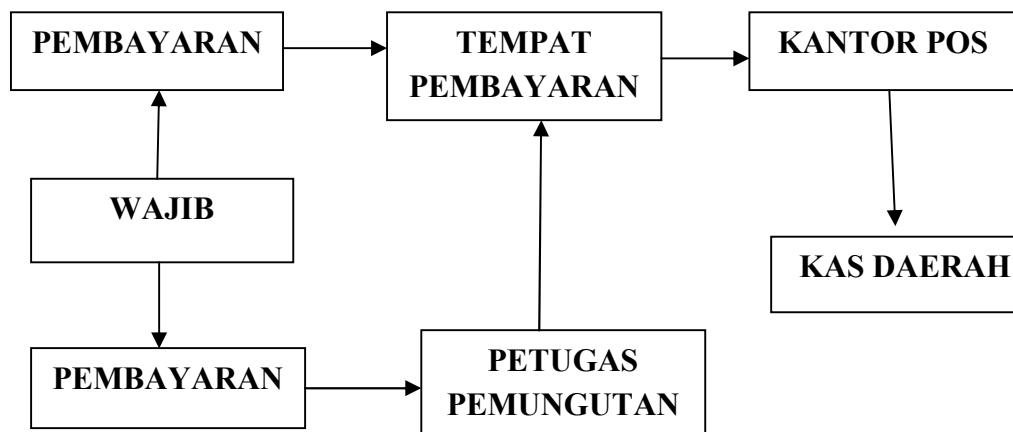
Sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 7 tahun 2002 tentang tata cara pembayaran pajak yaitu pembayaran pajak dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh kepala daerah sesuai waktu yang telah ditentukan dalam SPTPD, SKPD, dan SKPDKB.

Dari pengamatan penulis saat melakukan penelitian, sistem pemungutan yang terdapat pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan *system self assesment* yaitu dimana dalam proses pembayaran Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri, artinya pihak DESDM memberikan kewenangan atau kepercayaan kepada para wajib pajak untuk

menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Akan tetapi DESDM Kabupaten Kuantan Singingi terkadang juga menerapkan *with holding system*.

Untuk melihat alur penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dengan menggunakan *system self assesment* dapat di lihat pada gambar di bawah ini :

**Gambar 5.1 : Alur Penerimaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kuantan Singingi**



Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi 2011

Dari gambar 5.1 dapat di lihat bahwa sistem pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan secara *self assesment*, dimana para wajib pajak langsung membayar ketempat UPTD yang telah ditetapkan sebelumnya, kemudian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai fasilitator hanya memberi surat pemberitahuan sudah jatuh tempo pembayaran dan memberitahu kepada wajib pajak seandainya masih ada yang terlambat membayarnya.



Di dalam sistem pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan yang harus diperhatikan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi adalah :

1. Lebih mengawasi dalam pembukuan yang dilakukan oleh para wajib pajak sesering mungkin.
2. Memberikan pengarahan kepada para wajib pajak bahwa pajak yang mereka keluarkan adalah bertujuan untuk pembangunan dan kesejahteraan bersama, sehingga para wajib pajak termotivasi untuk melakukan pembukuan dan pelaporan dengan benar tanpa rekayasa.

### **5.1.2 Prosedur Pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan**

#### **5.1.2.1 Proses Pendaftaran dan Pendataan**

Setiap pengusaha wajib Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi hendaknya mendaftarkan usahanya kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kuantan Singingi, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum proses kegiatan usaha, untuk dikukuhkan dan akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

Surat pengukuhan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi tidak merupakan dasar untuk menentukan nilai saat terutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, tetapi hanya merupakan sarana administrasi dan pengawasan bagi petugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi selaku pelaksana pengelolaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kuantan Singingi.

Apabila pengusaha Mineral bukan Logam dan Batuan tidak mendaftarkan usahanya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi akan menetapkan pengusaha tersebut sebagai wajib pajak secara jabatan. Penetapan secara jabatan dimaksudkan untuk memberi nomor pengukuhan dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

Untuk mengetahui lebih jelasnya tentang pendaftaran dan pendataan wajib Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kuantan Singingi dalam hal pemungutan pajak dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.1 : Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang Pelaksanaan Pendaftaran dan Pendataan Terhadap Wajib Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Kabupaten Kuantan Singingi.**

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Baik	-	-
2	Baik	17	42,5%
3	Kurang baik	18	45%
4	Tidak baik	5	12,5%
Jumlah		40	100%

*Sumber : Data Olahan Dilapangan Tahun 2011*

Berdasarkan tabel 5.1 di atas, terlihat bahwa dari jumlah 40 responden yang dijadikan sampel, hanya 17 responden atau 42,5% responden mengatakan kegiatan pelaksanaan pendaftaran dan pendataan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan yang dilakukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral kategori “baik”, yakni terlaksana dengan baik.

Sedangkan yang masuk kategori “kurang baik” adalah sebanyak 18 responden atau sekitar 45% responden yaitu dalam pelaksanaan pendaftaran dan pendataan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan belum terlaksana dengan

maksimal. Sisanya 5 responden atau sekitar 12,5% responden mengatakan terkadang kegiatan pendaftaran dan pendataan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan termasuk kategori “tidak baik”, artinya tidak terlaksana dengan baik.

**Tabel 5.2 : Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang Upaya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Pengumpulan dan Penyusunan Data Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kuantan Singingi.**

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Baik	-	-
2	Baik	19	47,5%
3	Kurang baik	16	40%
4	Tidak baik	5	12,5%
Jumlah		40	100%

*Sumber : Data Olahan Dilapangan Tahun 2011*

Berdasarkan tabel 5.2 di atas, terlihat bahwa dari jumlah 40 responden, hanya 19 responden atau 47,5% responden mengatakan upaya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam hal pengumpulan dan penyusunan data subjek Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan kategori “baik” yakni terlaksana dengan baik.

Sedangkan yang masuk kategori “kurang baik” adalah sebanyak 16 responden atau sekitar 40% responden mengatakan upaya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam hal pengumpulan dan penyusunan data subjek Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan belum maksimal. Sisanya 5 responden atau sekitar 12,5% responden mengatakan terkadang dalam pengumpulan dan penyusunan data subjek Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan termasuk kategori “tidak baik”, artinya tidak terlaksana dengan baik.

**Tabel 5.3 : Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang Wajib Pajak yang tidak Mendaftarkan Usahannya pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi.**

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Baik	7	17,5%
2	Baik	11	27,5%
3	Kurang baik	15	37,5%
4	Tidak baik	7	17,5%
Jumlah		40	100%

*Sumber : Data Olahan Dilapangan Tahun 2011*

Berdasarkan tabel 5.3 di atas, terlihat bahwa dari jumlah 40 responden yang dijadikan sampel, hanya 7 responden atau 17,5% responden mengatakan tentang Wajib Pajak yang tidak Mendaftarkan Usahannya pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral kategori “sangat baik”, karena wajib pajak sudah mendaftarkan usahanya sesuai prosedur yang berlaku. Dan yang masuk kategori “baik” adalah sebanyak 11 responden atau sekitar 27,5% responden mengatakan tentang Wajib Pajak yang tidak Mendaftarkan Usahannya pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sudah ditindaklanjuti.

Sedangkan yang 15 responden atau 37,5% responden mengatakan tentang Wajib Pajak yang tidak Mendaftarkan Usahannya pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral “kurang baik” karena belum ditindaklanjuti dengan baik. Sisanya 7 responden atau sekitar 17,5% responden mengatakan tentang Wajib Pajak yang tidak Mendaftarkan Usahannya pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk kategori “tidak baik”, artinya tidak ditindaklanjuti oleh dinas terkait.

**Tabel 5.4: Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang Pencatatan Data Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kuantan Singingi.**

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Baik	4	10%
2	Baik	15	37,5%
3	Kurang baik	16	40%
4	Tidak baik	5	12,5%
Jumlah		40	100%

*Sumber : Data Olahan Dilapangan Tahun 2011*

Berdasarkan tabel 5.4 di atas, terlihat bahwa dari jumlah 40 responden yang dijadikan sampel, hanya 4 responden atau 10% responden mengatakan proses tentang Pencatatan Data wajib Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan yang dilakukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral kategori “sangat baik”, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan yang masuk kategori “baik” adalah sebanyak 15 responden atau sekitar 37,5% responden yaitu tentang Pencatatan Data wajib Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan sudah sesuai prosedur.

Sedangkan dari jumlah 40 responden yang dijadikan sampel, 16 responden atau 40% responden mengatakan tentang Pencatatan Data wajib Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan yang dilakukan oleh Dinas energi dan Sumber Daya Mineral belum maksimal. Sisanya 5 responden atau sekitar 12,5% responden mengatakan terkadang Pencatatan Data wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan termasuk kategori “tidak baik”, artinya tidak dilakukan sesuai dengan harapan.

**Tabel 5.5 : Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang prosedur Pendaftaran dan Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kuantan Singingi.**

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Baik	8	20%
2	Baik	12	30%
3	Kurang baik	18	45%
4	Tidak baik	2	5%
Jumlah		40	100%

*Sumber : Data Olahan Dilapangan Tahun 2011*

Berdasarkan tabel 5.5 di atas, terlihat bahwa 40 responden, hanya 8 responden atau 20% responden mengatakan prosedur Pendaftaran dan Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kuantan Singingi kategori “sangat baik”, karena sudah berjalan dengan baik. Dan yang masuk kategori “baik” adalah sebanyak 12 responden atau 30% responden yaitu prosedur Pendaftaran dan Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kuantan Singingi sudah maksimal.

Sedangkan dari jumlah 40 responden yang dijadikan sampel, 18 responden atau 45% responden mengatakan prosedur Pendaftaran dan Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kuantan Singingi masuk kategori “kurang baik” artinya belum berjalan dengan baik. Sisanya 2 responden atau sekitar 5% responden mengatakan terkadang prosedur Pendaftaran dan Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kuantan Singingi termasuk kategori “tidak baik”, dalam arti tidak dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Wawancara penulis dengan Kepala Bidang Geologi dan Pertambangan Umum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi bapak Junaidi, ST mengatakan : “*masih banyaknya para Pengusaha Mineral*

*bukan Logam dan Batuan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi yang belum mendaftarkan usahanya kepada kami, ini disebabkan kurangnya kesadaran dari mereka yang tidak mau mendaftarkan usahanya. Ketika kami melakukan pendataan mereka mengatakan usaha yang dikelolanya telah tutup, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kami tetap melakukan peninjauan ke lokasi mereka pada waktu yang berbeda”. (Hasil wawancara tanggal 16 Desember 2011).*

#### **5.1.2.2 Pembukuan dan Pelaporan**

Pembukuan adalah suatu proses penetapan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi keadaan harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak terakhir.

Wajib pajak yang tidak diwajibkan membuat pembukuan yaitu wajib pajak yang peredaran usahanya kurang dari jumlah yang ditentukan, tetap diwajibkan menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha secara teratur yang menjadi dasar pengenaan pajak. Pencatatan diselenggarakan dengan sebaik-baiknya yang mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya. Pembukuan atau pencatatan serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan usaha atau perusahaan wajib pajak harus disimpan selama lima tahun.

Adapun gambaran tentang pembukuan dan pelaporan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.6 : Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang Pembukuan dan Pelaporan Pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan yang terutang di Kabupaten Kuantan Singingi.**

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Sangat baik	6	15%
2	Baik	10	25%
3	Kurang baik	17	42,5%
4	Tidak baik	7	17,5%
Jumlah		40	100%

*Sumber : Data Olahan Dilapangan Tahun 2011*

Tabel 5.6 di atas menggambarkan tanggapan responden tentang kegiatan Pembukuan dan Pelaporan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan yang terutang, ternyata sebagian besar masuk kategori “kurang baik” yaitu dari jumlah 40 responden, 17 responden atau sekitar 42,5% responden menyatakan petugas terkait belum maksimal melakukan pembukuan dan pelaporan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan yang terutang dengan baik. Dan 7 responden atau sekitar 17,5% responden memberi tanggapan “tidak baik”, yaitu petugas Dinas terkait tidak melakukan dengan benar sehingga pembukuan dan pelaporan wajib pajak yang terutang amburadul.

Sedangkan 10 responden atau sekitar 25% responden menyatakan “baik”, karena petugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terkait telah melakukan pembukuan dan pelaporan wajib Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan yang terutang kedalam buku jenis pajaknya serta membuat laporan realisasi penerimaan secara rutin dan teratur. Sisanya 6 responden atau sekitar 15% responden mengatakan “sangat baik” ini sudah sesuai prosedur yang ditetapkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi.



**Tabel 5.7 : Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang Pembukuan dan Pelaporan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan yang dilakukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi.**

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Sangat baik	8	20%
2	Baik	15	37,5%
3	Kurang baik	11	27,5%
4	Tidak baik	6	15,5%
Jumlah		40	100%

*Sumber : Data Olahan Dilapangan Tahun 2011*

Tabel 5.7 di atas menggambarkan tanggapan responden tentang kegiatan pelaksanaan pembukuan dan pelaporan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan yang dilakukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, ternyata sebagian masuk kategori “sangat baik” yaitu 8 responden atau sekitar 20% responden menyatakan petugas terkait telah melakukan pembukuan dan pelaporan wajib Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan tersebut sesuai buku jenis pajaknya. Dan 15 responden atau sekitar 37,5% responden memberi tanggapan “baik”, yaitu petugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terkait telah melakukan pembukuan dan pelaporan data wajib Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan dengan baik.

Sedangkan 11 responden atau sekitar 27,5% responden menyatakan “kurang baik”, karena petugas Dinas terkait belum melakukan pembukuan dan pelaporan data-data wajib Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan dengan maksimal, sehingga peredaran usahanya kurang dari jumlah yang ditentukan. Sisanya 6 responden atau sekitar 15% responden mengatakan “tidak baik” artinya dinas terkait belum melakukan pembukuan dan pelaporan dengan baik.

**Tabel 5.8 : Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang Pembukuan dan Pelaporan berdasarkan keadaan dilapangan**

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Sangat baik	6	15%
2	Baik	17	25%
3	Kurang baik	12	42,5%
4	Tidak baik	5	17,5%
Jumlah		40	100%

*Sumber : Data Olahan Dilapangan Tahun 2011*

Tabel 5.8 di atas menggambarkan tanggapan responden tentang Pembukuan dan Pelaporan apakah berdasarkan keadaan dilapangan, ternyata sebagian besar masuk kategori “kurang baik” yaitu 17 responden atau 42,5% responden menyatakan pembukuan dan pelaporan tidak sesuai dengan keadaan dilapangan. Dan 7 responden atau 17,5% responden memberi tanggapan “tidak baik”, yaitu petugas dinas terkait tidak melakukan pembukuan dan pelaporan sesuai keadaan dilapangan.

Sedangkan 10 responden atau 25% responden menyatakan “baik”, karena pembukuan dan pelaporan telah sesuai keadaan dilapangan. Sisanya 6 responden atau 15% responden mengatakan “sangat baik” hal ini terlihat dari pembukuan dan pelaporan itu sangat sesuai dengan keadaan dilapangan.

**Tabel 5.9 : Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang tindakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap wajib Pajak yang tidak melakukan Pembukuan dan Pelaporan.**

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Sangat baik	-	-
2	Baik	21	52,5%
3	Kurang baik	17	42,5%
4	Tidak baik	2	5%
Jumlah		40	100%

*Sumber : Data Olahan Dilapangan Tahun 2011*

Tabel 5.9 di atas menggambarkan tanggapan responden tentang tindakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap wajib Pajak yang tidak melakukan Pembukuan dan Pelaporan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, ternyata sebagian besar masuk kategori “baik” yaitu 21 responden atau 52,5% responden menyatakan petugas dinas terkait telah melakukan tindakan bagi wajib pajak yang tidak membuat pembukuan dan pelaporan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan.

Sedangkan 17 responden atau 42,5% responden memberi tanggapan “kurang baik”, yaitu petugas dinas terkait belum maksimal melakukan tindakan bagi wajib Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan yang ada tidak membuat pembukuan dan pelaporan tentang usahanya. Sisanya 2 responden atau 2,5% responden mengatakan “tidak baik” ini terlihat bagi wajib pajak yang tidak melakukan pembukuan dan pelaporan tidak ditindaklanjuti oleh petugas dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terkait.

**Tabel 5.10 :Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang Pelaporan yang dilakukan wajib Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kuantan Singingi.**

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Sangat baik	-	-
2	Baik	19	47,5%
3	Kurang baik	15	37,5%
4	Tidak baik	6	15%
Jumlah		40	100%

*Sumber : Data Olahan Dilapangan Tahun 2011*

Tabel 5.10 di atas menggambarkan tanggapan responden tentang kegiatan pelaporan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan yang dilakukan oleh wajib pajak, ternyata sebagian besar masuk kategori “baik” yaitu 19 responden atau

47,5% responden menyatakan wajib pajak tersebut telah melaporkan dan membuat pembukuan dengan baik.

Sedangkan 15 responden atau 37,5% responden memberi tanggapan “kurang baik”, yaitu wajib pajak belum maksimal melakukan pelaporan dengan benar. Sisanya 6 responden atau 15% responden menyatakan “tidak baik”, karena wajib pajak tidak membuat pelaporan atas usaha yang dikelolanya.

### **5.1.2.3 Pemungutan (Penagihan)**

Pemungutan (penagihan) adalah merupakan tahapan akhir dari beberapa tahapan-tahapan dalam sistem penerimaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kuantan Singingi. Pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi dengan menggunakan *self assesment system*, yaitu memberikan wewenang kepada para wajib pajak untuk membayar pajaknya sendiri ketempat yang telah ditetapkan, dan menggunakan *with holding system* yaitu sistem pemungutan pajak memberikan wewenang kepada pihak ketiga dalam hal ini kolektor pemungut untuk memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Dari hasil observasi lapangan, kegiatan pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan dilakukan kolektor yang ditunjuk oleh pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu bagian penagihan ataupun bagian pertambangan umum.

Untuk lebih jelas mengenai sistem pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kuantan Singingi, dapat dilihat dari jawaban responden berikut ini :

**Tabel 5.11 :Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang Pemungutan yang dilakukan Kolektor dalam Melaksanakan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kuantan Singingi.**

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Sangat baik	2	5%
2	Baik	14	35%
3	Kurang baik	20	50%
4	Tidak baik	4	10%
Jumlah		40	100%

*Sumber : Data Olahan Dilapangan Tahun 2011*

Tabel 5.11 di atas menggambarkan tanggapan dari 40 responden dalam hal pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kuantan Singingi yang dilakukan oleh kolektor yang berwenang, terdapat 2 responden atau 5% responden mengatakan “sangat baik” bahwasannya pemungutan yang dilakukan kolektor tersebut sudah memenuhi standar aturan yang telah ditetapkan. Dan 14 responden atau sekitar 35% responden mengatakan pemungutan tersebut kategori “baik”, karena kolektor tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.

Sedangkan 20 responden atau sekitar 50% responden mengatakan “kurang baik” bahwa pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan yang dilakukan oleh kolektor yang berwenang belum terlaksana dengan maksimal. Sisanya 4 responden atau 10% responden mengatakan pemungutan Pajak Mineral bukan

Logam dan Batuan “tidak baik”, karena kinerja para kolektor yang melakukan pemungutan tidak terlaksana dengan baik.

**Tabel 5.12 :Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang Prosedur dalam Pemungutan yang diikuti oleh Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kuantan Singingi.**

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Sangat baik	4	10%
2	Baik	12	30%
3	Kurang baik	18	45%
4	Tidak baik	6	15%
Jumlah		40	100%

*Sumber : Data Olahan Dilapangan Tahun 2011*

Tabel 5.12 di atas menggambarkan tanggapan dari 40 responden tentang prosedur pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kuantan Singingi yang diikuti oleh wajib pajak, terdapat 18 responden atau 45% responden mengatakan “kurang baik” bahwasannya prosedur pemungutan tidak dapat diikuti oleh wajib pajak. Dan 6 responden atau 15% responden mengatakan prosedur pemungutan Pajak tersebut masuk kategori “tidak baik”, karena wajib pajak tidak bisa mengikuti prosedur yang telah ditentukan dengan baik.

Sedangkan 12 responden atau 30% responden mengatakan prosedur pemungutan tersebut kategori “baik”, karena wajib pajak bisa mengikuti aturan prosedur pemungutan pajak tersebut. Sisanya 4 responden atau 10% responden mengatakan “sangat baik” bahwa wajib Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan dapat mengikuti prosedur dengan baik.

**Tabel 5.13 :Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang realisasi Sistem dan Prosedur dalam Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Di Kabupaten Kuantan Singingi.**

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Sangat baik	-	-
2	Baik	16	40%
3	Kurang baik	22	55%
4	Tidak baik	2	5%
Jumlah		40	100%

*Sumber : Data Olahan Dilapangan Tahun 2011*

Tabel 5.13 di atas menggambarkan tanggapan dari 40 responden yang dijadikan sampel, terdapat 16 responden atau sekitar 40% responden mengatakan realisasi sistem dan prosedur pemungutan pajak yang ditetapkan pemerintah dalam kategori “baik”, karena sistem dan prosedur tersebut berjalan dengan baik.

Sedangkan 22 responden atau 55% responden mengatakan “kurang baik” bahwasannya sistem dan prosedur pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan batuan yang ditetapkan pemerintah belum terealisasi dengan baik. Sisanya 2 responden atau 5% responden mengatakan sistem dan prosedur pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan masuk kategori “tidak baik”, karena tidak terealisasi dengan baik sesuai harapan.

**Tabel 5.14 :Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang Hambatan Kolektor dalam Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Di Kabupaten Kuantan Singingi.**

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Sangat baik	2	5%
2	Baik	20	50%
3	Kurang baik	14	35%
4	Tidak baik	4	10%
Jumlah		40	100%

*Sumber : Data Olahan Dilapangan Tahun 2011*

Tabel 5.14 di atas menggambarkan tanggapan dari 40 responden tentang hambatan kolektor dalam pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kuantan Singingi, terdapat 2 responden atau 5% responden mengatakan “sangat baik” bahwa kolektor pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan dapat memberikan solusi dengan baik. Dan 20 responden atau sekitar 50% responden mengatakan para kolektor pemungutan tersebut kategori “baik”, karena hambatan-hambatan dalam pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan mampu diatasi dengan baik oleh kolektor pajak.

Sedangkan 14 responden atau 35% responden mengatakan “kurang baik” bahwasannya kolektor-kolektor pajak belum mampu mengatasi hambatan dalam pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kuantan Singingi. Sisanya 4 responden atau 10% responden mengatakan hambatan-hambatan tersebut termasuk kategori “tidak baik”, karena tidak ada solusi jika ada hambatan dalam pemungutan pajak dari kolektor tersebut.

**Tabel 5.15 :Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang Peraturan yang ditetapkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kuantan Singingi.**

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Sangat baik	9	22,5%
2	Baik	17	42,5%
3	Kurang baik	13	32,5%
4	Tidak baik	1	2,5%
Jumlah		40	100%

*Sumber : Data Olahan Dilapangan Tahun 2011*

Tabel 5.15 di atas menggambarkan tanggapan dari 40 responden tentang peraturan pemungutan (penagihan) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di



Kabupaten Kuantan Singingi, terdapat 9 responden atau 22,5% responden mengatakan “sangat baik” bahwasannya peraturan yang ditetapkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berjalan dengan baik tanpa ada hambatan. Dan 17 responden atau 42,5% responden mengatakan peraturan pemungutan tersebut kategori “baik”, karena sudah berjalan dengan maksimal.

Sedangkan 13 responden atau sekitar 32,5% responden mengatakan “tidak baik” bahwa peraturan pemungutan (penagihan) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan yang ditetapkan dinas terkait belum berjalan dengan baik. Sisanya 1 responden atau 2,5% responden mengatakan peraturan pemungutan (penagihan) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan “tidak baik”, karena tidak berjalan sesuai harapan.

**Tabel 5. 16 Rekapitulasi Penilaian Responden tentang Pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan yang meliputi : pendataan dan pendaftaran, pembukuan dan pelaporan, dan pemungutan (penagihan).**

N0	INDIKATOR	KATEGORI PENILAIAN				JML
		SB	B	KB	TB	
a. Prosedur Pemungutan Pajak						
- Pendaftaran dan pendataan						
1	Pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan	-	17	18	5	40
2	Tindakan terhadap pengusaha yang tidak mendaftar	-	19	16	5	40
3	Pendaftaran atas wajib pajak oleh dinas energi dan sumber daya mineral	7	11	15	7	40
4	Pencatatan data-data pajak mineral bukan logam dan batuan	4	15	16	5	40
5	Prosedur dalam hal pendaftaran dan pendataan	8	12	18	2	40

<b>- Pembukuan dan Pelaporan</b>						
1	Pembukuan tentang wajib pajak oleh dinas energi dan sumber daya mineral	6	10	17	7	40
2	Pelaporan dan pembukuan oleh dinas energi dan sumber daya mineral	8	15	11	6	40
3	Pelaporan dan pembukuan sesuai keadaan dilapangan	6	17	12	5	40
4	Wajib pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan dan pelaporan	-	21	17	2	40
5	Pelaporan oleh wajib pajak	-	19	15	6	40
<b>- Pemungutan (Penagihan)</b>						
1	Pemungutan pajak oleh kolektor	2	14	20	4	40
2	Prosedur dalam pemungutan	4	12	18	6	40
3	Sistem dan prosedur dalam hal pemungutan	-	16	22	2	40
4	Hambatan pada saat pemungutan	2	20	14	4	40
5	Peraturan pemungutan	9	17	13	1	40
<b>Jumlah</b>		56	235	242	67	600
<b>Persentase</b>		9,33	39,16	40,33	11,16	100

Dari tabel 5.16 hasil rekapitulasi penilaian responden tentang pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kuantan Singingi yang meliputi : pendaftaran dan pendataan, pembukuan dan pelaporan, dan pemungutan (penagihan) mengatakan bahwa 40,33% responden mengatakan “kurang baik” hal ini disebabkan oleh tidak optimalnya kinerja para petugas pemungut Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan tersebut, sehingga dalam memenuhi target dan realisasi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan yang telah ditetapkan tidak terpenuhi setiap tahunnya.

### 5.1.3 Kualitas Kerja (Sumber Daya Manusia)

Kegiatan manajemen tidak akan berjalan dengan baik dan tujuan tidak akan tercapai jika tidak disertai dengan sumber daya manusia yang andal. Sumber daya manusia (*human resources*) juga dinamakan personalia (*personnel*), adalah orang yang bekerja dalam organisasi atau orang yang melakukan aktivitas-aktivitas atau pekerjaan untuk pencapaian tujuan organisasi. Sumber daya manusia atau orang yang bekerja untuk mencapai tujuan organisasi dan bekerja secara profesional dan mengedepankan kualitas dari pekerjaan tersebut akan menghasilkan out put yang baik dan memuaskan.

Dalam hal hasil kinerja atau untuk mengukur kinerja para personalia ada dua kriteria yang dapat digunakan yaitu *effectiveness* dan *efficiency*. Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang tepat dan mencapainya. Ini termasuk pemilihan metode-metode yang tepat untuk mencapai tujuan atau sasaran tersebut. Sementara efisiensi adalah kemampuan untuk membuat penggunaan sumber-sumber daya yang ada secara baik dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Untuk itu dalam pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan yang merupakan rangkaian kegiatan pegawai yang pada dasarnya tidak terlepas dari penataan administrasi yang meliputi pengelolaan berbagai data tentang subjek dan objek pajak mengedepankan metode efektivitas dan efisiensi, sehingga administrasi berjalan dengan baik dan tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Tegasnya, pihak Dinas Pendapatan Daerah dan juga Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral selaku pengelola Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan

dituntut melakukan pencatatan data-data wajib pajak mineral bukan logam dan batuan yang telah terakumulasi di Kabupaten Kuantan Singingi tersebut, melakukan pelayanan terbaik kepada wajib pajak dan bekerja dengan baik dan profesional.

Adapun gambaran yang jelas tentang kualitas kerja (sumber daya manusia) dalam pelaksanaan pendataan dan pendaftaran, pemungutan (penagihan), dan pelayanan terhadap wajib pajak di Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.17 : Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang Kualitas Kerja Pegawai dalam Pemberian Pelayanan terhadap Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kuantan Singingi.**

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Sangat baik	-	-
2	Baik	13	32,5%
3	Kurang baik	18	45%
4	Tidak baik	9	22,5%
Jumlah		40	100%

*Sumber : Data Olahan Dilapangan Tahun 2011*

Tabel 5.17 di atas menggambarkan bahwa dari 40 responden yang dijadikan sampel, 13 responden atau 32,5% responden menanggapi “baik” karena pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sudah melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan.

Sedangkan yang masuk kategori “kurang baik” sebanyak 18 responden atau 45% responden karena pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi belum memberikan pelayanan secara maksimal. Sisanya 9 responden atau 22,5% responden yang masuk kategori “tidak baik”

dalam artinya pegawai dinas terkait tidak melaksanakan tugasnya dan tidak memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak.

**Tabel 5.18 :Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang Pendidikan dan Skil Pegawai Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kuantan Singingi.**

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Sangat baik	3	7,5%
2	Baik	15	37,5%
3	Kurang baik	16	40%
4	Tidak baik	6	15%
Jumlah		40	100%

*Sumber : Data Olahan Dilapangan Tahun 2011*

Tabel 5.18 di atas menggambarkan bahwa dari 40 responden, 3 responden atau 7,5% responden menanggapi “sangat baik” tentang Pendidikan dan Skil Pegawai Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Dan 15 responden atau 37,5 responden mengatakan Pendidikan dan Skil Pegawai Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan kategori “baik” di lihat latar belakang pendidikan dan skil yang dimiliki cukup bagus.

Sedangkan yang masuk kategori “kurang baik” sebanyak 16 responden atau 40% responden karena latar belakang pendidikan dan skil pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi belum memadai. Sisanya 6 responden atau 15% responden masuk kategori “tidak baik” artinya pegawai dinas terkait belum mempunyai skil yang bagus dalam pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kuantan Singingi dalam melaksanakan pekerjaanya.

**Tabel 5.19 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden tentang Perekrutan Petugas Pemungut sudah sesuai Bidang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kuantan Singingi.**

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Sangat baik	6	15%
2	Baik	17	42,5%
3	Kurang baik	13	32,5%
4	Tidak baik	4	10%
Jumlah		40	100%

*Sumber : Data Olahan Dilapangan Tahun 2011*

Tabel 5.19 di atas menggambarkan bahwa dari 40 responden yang dijadikan sampel, 6 responden atau 15% responden mengatakan dalam perekrutan pegawai pemungutan pajak “sangat baik”. Dan 17 responden atau sekitar 37,5% responden menanggapi “baik” karena sudah sesuai peraturan yang berlaku.

Sedangkan yang masuk kategori “kurang baik” sebanyak 13 responden atau 32,5% responden karena perekrutan pegawai pemungutan pajak belum sesuai dengan aturan. Sisanya 4 responden atau 10% responden masuk kategori “tidak baik” artinya dalam perekrutan petugas terkait tidak dilaksanakan sesuai prosedur.

**Tabel 5.20 : Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang Pegawai Menguasai tata cara pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kuantan Singingi.**

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Sangat baik	5	12,5%
2	Baik	13	32,5%
3	Kurang baik	15	37,5%
4	Tidak baik	7	17,5%
Jumlah		40	100%

*Sumber : Data Olahan Dilapangan Tahun 2011*

Tabel 5.20 di atas menggambarkan bahwa dari 40 responden, 5 responden atau 12,5% responden tentang pegawai yang menguasai tata cara pelaksanaan

pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan “sangat baik”. Dan 13 responden atau 32,5% responden menanggapi “baik” karena pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sudah menguasai tentang tata cara pelaksanaan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan baik.

Sedangkan yang masuk kategori “kurang baik” sebanyak 15 responden atau sekitar 37,5% responden karena pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi belum menguasai tata cara pelaksanaan pemungutan Pajak. Sisanya 7 responden atau 17,5% responden masuk kategori “tidak baik” artinya pegawai dinas terkait tidak menguasai tata cara pelaksanaan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

**Tabel 5.21 : Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang Kinerja Pegawai Pemungut Pajak dalam Melaksanakan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kuantan Singingi.**

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Sangat baik	7	17,5%
2	Baik	16	40%
3	Kurang baik	14	35%
4	Tidak baik	3	7,5%
Jumlah		40	100%

*Sumber : Data Olahan Dilapangan Tahun 2011*

Tabel 5.21 di atas menggambarkan bahwa dari 40 responden yang dijadikan sampel, 7 responden atau 17,5% responden mengatakan tentang Kinerja Pegawai Pemungut Pajak dalam Melaksanakan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan “sangat baik”, dan 16 responden atau sekitar 40% responden menanggapi “baik” karena kinerja petugas pemungut cukup bagus.

Sedangkan yang masuk kategori “kurang baik” sebanyak 14 responden atau sekitar 35% responden karena petugas pemungut dalam melaksanakan pemungutan belum berjalan dengan baik, sisanya 3 responden atau 7,5% responden masuk kategori “tidak baik” artinya petugas pemungut gagal dalam melakukan pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kuantan Singingi.

**Tabel 5.22 Rekapitulasi Penilaian Responden tentang Kualitas Kerja (sumber daya manusia).**

N0	INDIKATOR	KATEGORI PENILAIAN				JML
		SB	B	KB	TB	
Kualitas Kerja (Sumber Daya Manusia)						
1	Pemberian layanan oleh petugas pemungutan	-	13	18	9	40
2	Pendidikan dan skil petugas	3	15	16	6	40
3	Proses perekrutan kolektor	6	17	13	4	40
4	Petugas pemungutan pajak menguasai tentang tata cara pelaksanaan pemungutan	5	13	15	7	40
5	Kinerja para petugas pemungutan pajak	7	16	14	3	40
Jumlah		21	74	76	29	200
Persentase		10,5	37	38	14,5	100

Tabel 5.22 hasil rekapitulasi penilaian responden tentang Kualitas Kerja (sumber daya manusia) 38% responden mengatakan “kurang baik” artinya sumber daya manusianya kurang andal dan belum memberikan pelayanan yang baik kepada wajib Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan.



Dari hasil rekapitulasi penilaian responden tersebut dapat disimpulkan bahwa pegawai di kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi ada yang berlatar belakang pendidikan tinggi yaitu strata 1 (S1), tetapi ada juga pegawai yang berpendidikan SMA sederajat. Sehingga kinerja sumber daya manusia (pegawai) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi belum maksimal dalam melaksanakan pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan.

#### **5.1.4 Partisipasi Wajib Pajak**

Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi dengan melaksanakan pemungutan dengan baik mengikuti prosedur yang telah ditentukan dan perlu dukungan dari semua masyarakat, terutama wajib Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan agar berpartisipasi dalam melakukan pembayaran terhadap pajak usaha yang dikelolanya.

Para wajib pajak diharapkan untuk mematuhi peraturan dan ketentuan pembayaran pajak yang telah ditetapkan pada waktunya dan tidak menunda-nunda pembayarannya, karena partisipasi pembayaran pajak adalah suatu wujud keikutsertaan dalam mendukung suksesnya pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah. Dengan melaksanakan pembayaran pajak tepat pada waktunya, berarti wajib pajak telah ikut berpartisipasi untuk membangun daerah.

Untuk mengetahui bagaimana partisipasi wajib pajak dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5.23 : Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang Partisipasi Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kuantan Singingi.**

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Sangat baik	7	17,5%
2	Baik	11	27,5%
3	Kurang baik	16	40%
4	Tidak baik	6	15%
Jumlah		40	100%

*Sumber : Data Olahan Dilapangan Tahun 2011*

Berdasarkan tabel 5.23 di atas, menggambarkan bahwa dari 40 responden yang dijadikan sampel, 7 responden atau 17,5% responden mengatakan tentang Partisipasi Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kuantan Singingi “sangat baik”, dan 11 responden atau sekitar 27,5% responden memberi tanggapan “baik”, dengan alasan bahwa wajib pajak telah berpartisipasi dalam pembayaran Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan yang dikelolanya.

Sedangkan sebagian besar masuk dalam kategori “kurang baik”, yakni 16 responden atau 40% responden menyatakan bahwa kesadaran partisipasi wajib pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kuantan Singingi kurang dan banyak terjadi tunggakan pembayaran pajak. Sisanya 7 responden atau 17,5% responden mengatakan “tidak baik” karena para Wajib Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan tidak membayar kewajibannya ini dilihat dari hasil target realisasi pertahun dan hasil pemantaun dilapangan.

**Tabel 5.24 : Distribusi Frekuensi tanggapan Respondenn tentang Pembayaran Pajak Tepat Waktu oleh Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kuantan Singingi.**

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Sangat baik	-	-
2	Baik	13	32,5%
3	Kurang baik	21	52,5%
4	Tidak baik	6	15%
Jumlah		40	100%

*Sumber : Data Olahan Dilapangan Tahun 2011*

Berdasarkan tabel 5.24 di atas, menggambarkan bahwa dari 40 responden yang dijadikan sampel, ternyata sebagian besar masuk dalam kategori “kurang baik”, yakni 21 responden atau 52,2% responden menyatakan wajib pajak belum dapat membayar pajak tepat waktu, dan 6 responden atau 15% responden memberi tanggapan “tidak baik”, artinya wajib pajak tidak melakukan pembayaran Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan.

Sedangkan 13 responden atau sekitar 32,5% responden memberi tanggapan “baik”, dengan alasan bahwa wajib pajak telah melakukan pembayaran tepat waktu dari jatuh tempo yang telah ditentukan.

**Tabel 5.25 : Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang Pembayaran Sesuai Tarif oleh Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kuantan Singingi.**

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Sangat baik	6	15%
2	Baik	15	37,5%
3	Kurang baik	14	35%
4	Tidak baik	5	12,5%
Jumlah		40	100%

*Sumber : Data Olahan Dilapangan Tahun 2011*

Berdasarkan tabel 5.25 di atas, menggambarkan bahwa dari 40 responden yang dijadikan sampel, yakni 6 responden atau 15% responden mengatakan “sangat baik” karena menurut responden para wajib pajak mineral bukan logam dan batuan membayar pajak sesuai tarif yang telah ditentukan, dan 15 responden atau 37,5% responden memberi tanggapan “baik”, dengan alasan bahwa wajib pajak melakukan pembayaran dengan baik sesuai tarifnya.

Sedangkan 14 responden atau sekitar 35% responden menyatakan bahwa wajib pajak terkadang belum membayar sesuai tarif yang telah ditentukan, sisanya 5 responden atau 12,5% responden memberi tanggapan “tidak baik”, tidak mampu membayar pajak sesuai tarif yang telah ditentukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi.

**Tabel 5.26 : Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang Pembayaran Pajak dengan *System Self Aessment* oleh Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kuantan Singingi.**

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Sangat baik	-	-
2	Baik	18	45%
3	Kurang baik	20	50%
4	Tidak baik	2	5%
Jumlah		40	100%

Sumber : Data Olahan Dilapangan Tahun 2011

Berdasarkan tabel 5.26 diatas, menggambarkan bahwa dari 40 responden yang dijadikan sampel, ternyata sebagian besar masuk dalam kategori “kurang baik”, yakni 20 responden atau 50% responden menyatakan bahwa Pembayaran Pajak dengan *System Self Aessment* oleh Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan belum berjalan maksimal, dan 2 responden atau 2,5% responden memberi

tanggapan “tidak baik”, karena wajib pajak tidak melaksanakan Pembayaran Pajak dengan menggunakan *System Self Aessment* dengan baik.

Sisanya 18 responden atau 45% responden memberi tanggapan “baik”, dengan alasan bahwa wajib pajak bisa mengikuti Pembayaran Pajak dengan menggunakan *System Self Aessment* dengan baik sesuai aturan yang berlaku.

**Tabel 5.27 : Distribusi Frekuensi tanggapan Responden tentang Penunggakan Pembayaran oleh Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kuantan Singingi.**

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase
1	Sangat baik	4	10%
2	Baik	11	27,5%
3	Kurang baik	19	47,5%
4	Tidak baik	6	15%
Jumlah		40	100%

Sumber : Data Olahan Dilapangan Tahun 2011

Berdasarkan tabel 5.27 di atas, menggambarkan bahwa dari 40 responden yang dijadikan sampel, ternyata sebagian besar masuk dalam kategori “kurang baik”, yakni 19 responden atau sekitar 47,5% responden menyatakan bahwa penunggakan pembayaran oleh wajib pajak sering terjadi, dan 6 responden atau sekitar 15% responden memberi tanggapan “tidak baik”, dengan alasan para wajib pajak banyak yang menunggak pembayaran pajak usaha yang dikelolanya.

Sedangkan 4 responden atau sekitar 10% responden mengatakan “sangat baik” karena menurut responden para wajib pajak mineral bukan logam dan batuan tidak ada penunggakan dalam pembayaran pajak usahanya. Sisanya 11 responden atau sekitar 27,5% responden memberi tanggapan “baik”, dengan alasan bahwa wajib pajak bisa mengikuti pembayaran tepat pada waktu yang ditentukan, artinya tidak ada penunggakan dalam pembayaran pajak tersebut.

**Tabel 5.28 Rekapitulasi Penilaian responden tentang Partisipasi wajib pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kuantan Singingi.**

N0	INDIKATOR	KATEGORI PENILAIAN				JML
		SB	B	KB	TB	
Partisipasi Wajib Pajak						
1	Partisipasi wajib pajak	7	11	16	6	40
2	Wajib pajak membayar sesuai waktu	-	13	21	6	40
3	Wajib pajak melakukan pembayaran sesuai tarif	6	15	14	5	40
4	Pembayaran dengan <i>system self asesment</i>	-	18	20	2	40
5	Penunggakan pembayaran	4	11	19	6	40
Jumlah		17	68	90	25	200
Persentase		8,5	34	45	12,5	100

Dari tabel 5.28 hasil rekapitulasi penilaian responden tentang partisipasi wajib pajak 45% responden mengatakan “kurang baik” karena banyak penunggakan dalam pembayaran pajak oleh wajib Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan. Dapat disimpulkan dari hasil rekapitulasi penyebaran kuisioner secara keseluruhan dan hasil observasi di lapangan pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kuantan Singingi belum berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi bapak ir. H. Mashuri In, M.si., ia mengatakan : *“kalau dilihat partisipasi wajib pajak memang kurang, ini terlihat dari penunggakan pembayaran dari setiap wajib pajak. Wajib pajak memberikan alasan setiap kali pemungutan, bahwasannya mereka tidak mendapatkan hasil dari usaha yang dilakukannya. Namun, kami tetap memberikan sanksi kepada para wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban dan bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak dari waktu yang telah ditentukan”*. (hasil wawancara tanggal 16 Desember 2011).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan kurangnya partisipasi wajib pajak, ini terlihat dilapangan para wajib pajak banyak yang menunggak pembayaran dari waktu yang telah ditentukan. Pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral telah memberi peringatan melalui surat maupun teguran, namun belum mendapat perhatian yang serius dan tidak mendapatkan respon yang positif dari pengusaha Mineral bukan Logam dan Batuan.

Menurut salah seorang subjek pajak yaitu bapak Doni Aprilian pengusaha batuan mengatakan : *“kami terkadang memang ada terlambat membayar pajak, karena usaha yang kami kelola ini terkadang jarang mendapat orderan atau permintaan dari konsumen, ya mahlum namanya usaha pengambilan batuan untuk bangunan tentu kami menunggu orderan dulu, kalau tidak ada orderan bagaimana kami mau membayar pajak, ditambah lagi banyak preman yang minta duit sama kami”*. (hasil wawancara tanggal 15 desember 2011).

Dari jawaban responden di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan mendasar si wajib pajak sehingga terjadi penunggakan adalah faktor kurangnya permintaan (orderan) akan bahan galian yang mereka kelola sehingga omzet yang di dapat tidak maksimal, ditambah dengan pungutan-pungutan liar yang dimintai para preman yang tidak bertanggungjawab.

## **5.2. Hambatan dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral bukan**

### **Logam dan Batuan di Kabupaten Kuantan Singingi**

Berdasarkan hasil penelitian, tidak tercapainya target realisasi penerimaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kuantan Singingi yang sudah ditentukan karena ditemui masih adanya hambatan-hambatan sebagai berikut :

1. Faktor Sumber Daya manusia (SDM) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi belum memenuhi standar yang diharapkan karena masih ada pegawai yang berpendidikan SLTA.
2. Kurangnya kesadaran dari wajib Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan untuk membayar pajak, sehingga mempengaruhi kelancaran proses administrasi perpajakan.
3. Pemberian sanksi terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak kurang terlaksana dengan baik, sehingga wajib pajak merasa tidak keberatan apabila tidak membayar pajak.



## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1. Kesimpulan**

Sebagai tahap akhir penulisan ini diberikan suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan pokok yang telah dirumuskan sebelumnya, maka berdasarkan hasil pembahasan secara keseluruhan indikator penelitian dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Target dan realisasi penerimaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Sesuai hasil penelitian yang dilakukan penulis, mengenai target dan realisasi yang ditetapkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral selaku pelaksana pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan dari target realisasi penerimaan pajak tersebut belum terpenuhi secara baik.
2. Dari pelaksanaan pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan yang meliputi ; Pendaftaran dan Pendataan, Pembukuan dan Pelaporan, dan Pemungutan (Penagihan) yang dilakukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi belum terlaksana dengan baik, ini terbukti dari hasil observasi dan penyebaran angket dari 40 responden yang dijadikan sampel 40,33% responden mengatakan “kurang baik”.
3. Belum optimalnya sistem kerja dalam pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan karena kurangnya kualitas sumber daya manusia (pegawai) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, ini terbukti dari hasil

observasi dan penyebaran angket sebanyak 40 responden yang dijadikan sampel sekitar 38% responden mengatakan “kurang baik”.

4. Kurangnya partisipasi wajib pajak disebabkan oleh penghasilan dari usaha Mineral bukan Logam dan Batuan yang tidak menentu dan kurangnya permintaan akan bahan mineral bukan logam dan batuan yang mereka kelola, sehingga terjadi penunggakan pembayaran pajak tersebut.

## **6.2. Saran**

Dari hasil pembahasan penelitian ini akan diberikan saran sebagai sumbang sih pemikiran yang menjadi masukan dalam perbaikan dan pengentasan masalah pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, diantaranya :

1. Hendaknya pihak Dinas Pendapatan daerah dan juga Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi selaku pengelola dan pelaksana pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan untuk dapat menetapkan target dan realisasi penerimaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan dengan baik, dan harus membuat target penerimaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan terperiode, sistem pembukuan dan pelaporan lebih transparan, serta membuat ketentuan dan peraturan lebih ketat.
2. Dalam pendaftaran dan pendataan sebaiknya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kuantan Singingi selaku pengelola dan pelaksana dalam hal pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan lebih mengamati segi penindak lanjutan masalah pendaftaran, perbaikan

sistem pendataan wajib pajak, pencatatan data-data, pendaftaran prosedur pendataan pajak, serta sumber daya manusianya.

3. Wajib Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan disarankan agar senantiasa mematuhi peraturan dan ketentuan tentang pembayaran pajak yang telah ditetapkan pada waktunya dan tidak menunda pembayarannya, karena partisipasi pembayaran pajak adalah keikutsertaan dalam mendukung suksesnya pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan.
4. Bagi wajib pajak yang menunda membayar pajak dan yang tidak membayar pajak hendaknya diberikan sanksi administrasi yang tegas dan objektif oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam hal ini juga Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral selaku pelaksana pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan sehingga peraturan dapat terealisasi secara baik.
5. Diharapkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan juga Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral selaku pelaksana pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan sebaiknya lebih memperhatikan sistematika pemungutan, prosedur pemungutan, dan Sumber Daya Manusia serta hambatan dalam pemungutan yang dilakukan oleh kolektor, pada saat pemungutan (penagihan) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta: Jakarta.
- Bohari. 2006. *Pengantar Hukum Pajak*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Kansil, C.S.T. 2006. *Pengaturan Undang-undang Otonomi Daerah*. PT. Pradya Paramitha: Jakarta.
- Setia, Tunggal. 1999. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Harvarindo.
- Setiawan, Agus dan Basri Musri. 2006. *Perpajakan Umum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Siagian, S.P. 2005. *Administrasi Pembangunan*. Bumi Aksara
- Sugianto, 2008. *Pajak dan Retribusi Daerah*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia : Jakarta.
- Sugiono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta.
- Sumyar. 2004. *Dasar-dasar Hukum Perpajakan*. Andi Offset.
- Waluyo. 2007. *Perpajakan di Indonesia*. Salemba Empat: Jakarta.

**Peraturan-peraturan dan Undang-undang :**

Buku profil Kabupaten Kuantan Singingi/2009

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Lengkap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2009. Fokus Media.

Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi Universitas Indonesia, Volume XIV/Januari/2006

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 *Tentang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan*

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. *Tentang Pemerintah Daerah*. Sinar Grafika.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999. *Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah*. Sinar Grafika.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. *Tentang Sistem Pemerintahan Indonesia*. Visi Media.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.